

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK),
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN**
(Studi pada Perbankan Syariah Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FENTI RAHMAWATI NINGTYAS
0610320171



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2011

MOTTO

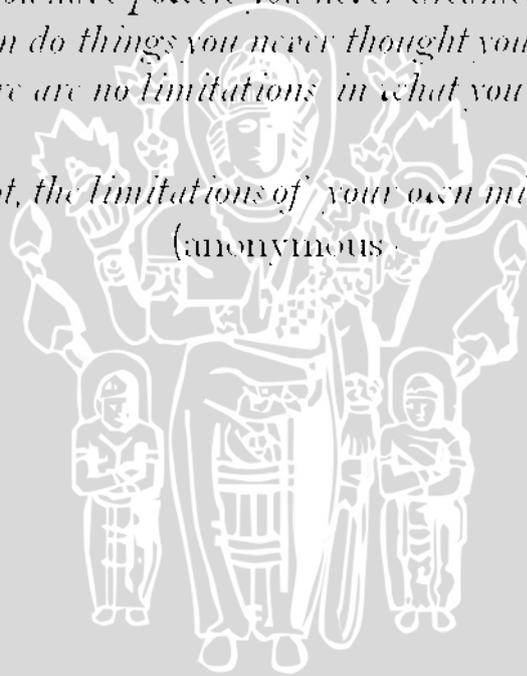
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

· Qs An-Najm 39 ·

*You have powers you never dreamed of,
You can do things you never thought you could do,
There are no limitations in what you can do,*

Except, the limitations of your own minds.

(anonymous)



RINGKASAN

Fenti Rahmawati Ningtyas, 2011, **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan (Studi pada Perbankan Syariah Indonesia)** Prof. Dr. Suhadak, M. Ec., Drs. Muhammad Saifi, M. Si.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan (Studi pada Perbankan Syariah Indonesia)”, dilatarbelakangi oleh kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan syariah untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *eksplanatory* serta metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Penelitian tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu dana pihak ketiga dan *non performing financing* dengan jumlah pembiayaan sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 laporan keuangan gabungan. Semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui unsur-unsur variabel dana pihak ketiga, *non performing financing* dan jumlah pembiayaan pada perbankan syariah seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel pada tingkat signifikansi $< 0,05$ dan data diolah menggunakan komputer program SPSS 15 *for windows*.

Berdasarkan hasil analisis inferensial dengan menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan nilai signifikansi F yaitu $0,000 < 0,05$ (alpha) dan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,723. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi/sumbangan DPK dan NPF terhadap Jumlah Pembiayaan adalah sebesar 72,3% sedangkan sisanya 27,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Jumlah Pembiayaan sehingga keputusan terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* baik secara parsial dan simultan terbukti dan dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Jumlah Pembiayaan sebagai variabel terikat. Secara keseluruhan variabel dana pihak ketiga sudah baik dalam perkembangan atau pendorong pengucuran dana di perbankan syariah namun tetap saja pihak perbankan harus memperhatikan pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih tinggi jumlah pertumbuhannya. Dengan prinsip kehati-hatian baik dalam memilih nasabah maupun dalam pengucuran dana maka akan menghindari kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan (Studi pada Perbankan Syariah Indonesia).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis (SAB) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, D.E.A. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M. Ec. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Bapak Drs. Muhammad Saifi, M. Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan, staf dan karyawan pada Kantor Bank Indonesia Surabaya yang telah memberikan ijin dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
8. Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
9. Rekan – rekan mahasiswa angkatan 2006 yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi sampai selesai.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang , Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Bank Syariah	17
1. Tinjauan Umum Bank Syariah	17
2. Tujuan Didirikannya Bank Islam.....	19
3. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah	19
4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	20
C. Penyaluran Dana Perbankan Syariah	25
1. Pengertian Pembiayaan	25
2. Macam-macam Pembiayaan	25
D. Pembiayaan	34
E. Dana Pihak Ketiga	35
F. <i>Non Performing Financing</i>	37
G. Tinjauan Teoritis tentang Keterkaitan Variabel- Variabel yang Berpengaruh Terhadap Jumlah (Penyaluran) Pembiayaan	43
H. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional	47

1. Variabel	47
2. Definisi Operasional	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Jenis dan Sumber Data.....	49
2. Metode Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	50
1. Analisis Statistik Deskriptif	50
2. Analisis Statistik Inferensial	50
3. Uji Asumsi Klasik	51
4. Uji Hipotesis	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Sejarah Singkat Bank Indonesia	62
2. Misi	63
3. Visi	63
4. Nilai-nilai Strategis	64
5. Status	64
6. Tujuan	64
7. Tugas	65
B. Gambaran Umum Sampel Perbankan Syariah	65
1. Bank Umum Syariah	65
2. Unit Usaha Syariah	76
C. Analisis dan Interpretasi Data	86
1. Statistik Deskriptif Variabel secara Keseluruhan	86
2. Deskripsi Variabel Penelitian	87
3. Regresi Linier Berganda	95
4. Pengujian Asumsi Klasik	99
5. Pengujian Hipotesis	105
D. Pembahasan	112
1. Pengaruh DPK dan NPF secara simultan terhadap Jumlah Pembiayaan	112
2. Pengaruh DPK dan NPF secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan	115
3. Variabel Bebas yang berpengaruh dominan terhadap Jumlah Pembiayaan	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

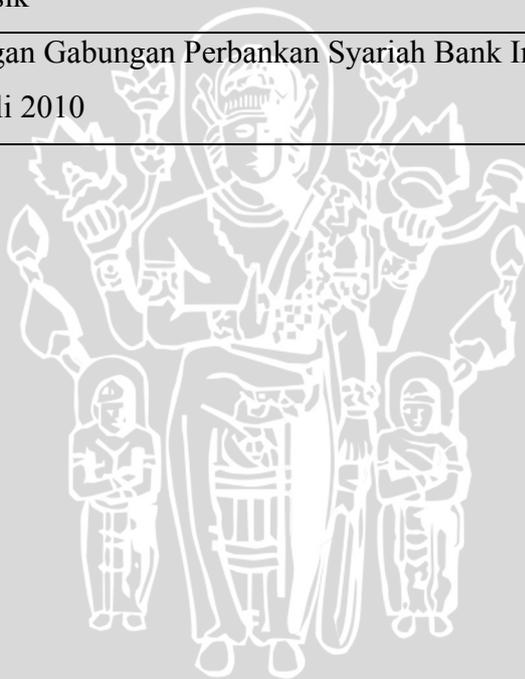
No. Tabel	Judul	Hal.
1	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia	7
2	Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia	8
3	Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
4	Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia dari Tahun 2006-2009	25
5	Penggolongan Kualitas Penyaluran Dana	39
6	Keputusan ada tidaknya autokorelasi	56
7	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	86
8	Data Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Periode Januari 2007 – Juli 2010	88
9	Data <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perbankan Syariah Periode Januari 2007 – Juli 2010	91
10	Data Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Periode Januari 2007 – Juli 2010	93
11	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	96
12	Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	99
13	Hasil Uji Linieritas Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan	100
14	Hasil Uji Linieritas <i>Non Performing Financing</i> dan Jumlah Pembiayaan	101
15	Hasil Uji Normalitas	102
16	Hasil Uji Multikolinieritas	103
17	Hasil Uji Autokorelasi	104
18	Hasil Uji Heterokedastisitas	105
19	Hasil Uji F	107
20	Hasil Uji Koefisien Korelasi	111
21	Hasil Uji Parsial	111

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Hal
1	Macam-macam Pembiayaan	27
2	Skema <i>Murabahah</i>	28
3	Skema <i>Salam</i>	29
4	Skema <i>Istishna'</i>	30
5	Skema <i>Mudharabah</i>	31
6	Skema <i>Musyarakah</i>	33
7	Skema IMBT	34
8	Model Hipotesis	45
9	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	90
10	Pertumbuhan Non Performing Financing	92
11	Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan	95

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran
1.	Curriculum Vitae
2.	Surat Keterangan Penelitian
3.	Data Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Jumlah Pembiayaan dan Jumlah Bank Syariah Indonesia
4.	Data yang disederhanakan
5.	Analisis Statistik
6.	Uji Asumsi Klasik
7.	Laporan Keuangan Gabungan Perbankan Syariah Bank Indonesia Periode Januari 2007-Juli 2010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari baik kebutuhan *primer*, *sekunder* maupun *tersier*. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam perekonomian, bank mempunyai peranan penting bagi pemerintah yaitu sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan moneter (Muhammad, 2006: 3).

Lembaga keuangan khususnya perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Di Indonesia, sektor perbankan merupakan urat nadi bagi sektor keuangan, baik dilihat dari sisi pasiva (pengerahan dana) maupun dari sisi aktiva (perkreditan), mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan

antara pihak yang kelebihan dana (unit *surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (unit *defisit*).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit / bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998). Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui fasilitas pembiayaan.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan seharusnya mampu melakukan mekanisme pengumpulan dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal itu maka perlu adanya kejelasan sistem operasional perbankan. Dengan adanya beberapa bank yang dilikuidasi saat Indonesia dilanda krisis moneter, tepatnya Juli tahun 1997, menunjukkan ada sesuatu yang “tidak beres” dalam sistem yang kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga “penyuntik darah” pembangunan ini sebagai “sarang-sarang perampok berdasi” yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena aktual yang

menarik untuk dicermati. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya Paket Deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Semakin banyaknya bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (bank syariah) menunjukkan bahwa Negara Indonesia memberikan sebuah solusi bagi umat Islam dalam dunia perekonomian. Dalam pelaksanaannya bank-bank syariah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam.

Melihat demografi Indonesia yang didominasi penduduk muslim, sedikit banyak memberikan titik terang bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan syariah Islam akan berkembang pesat. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengingat 200 Juta lebih penduduk Indonesia yang beragama Islam, peminat perbankan syariah masih tidak beranjak dari kisaran 1 Juta orang, dengan total aset perbankan syariah masih kurang dari 2 % dari total aset perbankan nasional. Tidak jarang juga dari masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang begitu jelasnya keharaman bunga bank.

Munculnya bank yang berbasis syariah merupakan salah satu alternatif solusi pemulihan perbankan di Indonesia. Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktek. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan *riba* dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, diantaranya: Transaksi

berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil, serta dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Bank syariah didalam memberikan modal kepada nasabah tidak memakai kata pinjam-meminjam karena disebabkan dua hal, yaitu: Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam, masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti: jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial bukan komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Oleh sebab itu, dalam bank syariah pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga memberikan fasilitas berupa pembiayaan. Namun jasa-jasa pembiayaan yang diberikan lebih beragam jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kegiatan penyaluran dana ini meliputi *leasing (ijarah)*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan (*murabahah*), pembelian barang oleh bank syariah kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka (*salam*), pembelian barang oleh bank syariah kepada

perusahaan manufaktur dan konstruksi dengan beberapa kali pembayaran (*istishna*'), pinjaman modal untuk usaha (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*) dan lain sebagainya.

Perbedaan mendasar antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada distribusi risiko usaha. Pada sistem pembiayaan konvensional (berbasis bunga), balas jasa modal ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dan risiko sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak. Apabila nasabah sebagai deposan, maka risiko sepenuhnya berada pada pihak bank dan sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, maka risiko sepenuhnya berada di tangan peminjam. Sementara pada sistem syariah ditetapkan sistem bagi hasil dimana jasa dan modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada "akad". Prinsip utama dari "akad" adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal.

Mekanisme pembiayaan pada bank syariah berprinsip pada mitra usaha yang bebas bunga. Prinsip mitra usaha syariah tersebut dapat direfleksikan melalui kegiatan *syirkah* (persekutuan antara kedua belah pihak). Perjanjian sekutu yang dilakukan antara *sohibul maal* (pemilik modal) dengan *mudhorib* (pengguna modal) menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Lebih lanjut, *profit sharing* yang diterapkan pada *syirkah* bergantung pada keuntungan yang diterima oleh pengguna modal.

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh perkembangannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana

merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* sebuah bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah maka *budget* bank tersebut juga bertambah. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Berdasarkan data empiris selama ini, data yang berasal dari pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (Muhammad, 2002).

Kegiatan menghimpun dana oleh bank sering disebut dengan kegiatan *funding*. Kegiatan *funding* juga dilakukan oleh bank syariah. Agar masyarakat tertarik untuk menyimpan uangnya pada bank syariah, maka pihak bank

syariah membuat berbagai macam bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perbankan membutuhkan sumber dana, dan salah satu sumber tersebut didapat dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau bisa dikatakan sebagai dana pihak ketiga (DPK). Peningkatan jumlah DPK akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan bank untuk segala macam pembiayaan. Berarti semakin bertambah jumlah DPK maka semakin bertambah pula pembiayaan yang diberikan oleh bank. Perkembangan dana pihak ketiga dapat dilihat di:

Tabel 1
PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 (dalam juta rupiah)

Tahun	September	Oktober	Nopember	Desember
2007	24.680.417	25.473.335	25.658.163	28.011.670
2008	33.568.573	11.731.978	34.422.283	36.852.148
2009	45.381.000	46.500.000	47.887.000	52.271.000

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2010

Bank syariah tidak dapat menghindari timbulnya risiko pembiayaan dalam proses menyalurkan dananya. Hal tersebut terjadi ketika bank tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang disalurkan atau investasi yang sedang dilakukannya. Risiko pembiayaan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan ketika tingkat jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* (NPF)) menjadi besar, semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan

pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (NPF). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah dari tahun 2007-2009 menunjukkan kenaikan.

Tabel 2
PERKEMBANGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF)
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 (dalam juta rupiah)

Tahun	September	Oktober	Nopember	Desember
2007	1.601.686	1.628.602	1.501.323	1.131.202
2008	1.553.870	1.710.708	1.913.044	1.508.674
2009	2.547.000	2.492.000	2.534.000	1.882.000

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2010

Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, baik tunai maupun non tunai. Sebagai pedoman pengembangan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan *blue print* Sistem Pembayaran Nasional yang direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mengurangi resiko pembayaran antar bank dan meningkatkan efisiensi layanan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia berwenang melaksanakan serta memberi izin kepada instansi tertentu untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran seperti sistem *transfer* dan *kliring* maupun sistem pembayaran

lainnya. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dengan mewajibkan para penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.

Melihat gambaran tentang penyaluran pembiayaan perbankan syariah nasional serta masih kecilnya kontribusi pembiayaan terhadap total kredit yang disalurkan perbankan secara keseluruhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan?
2. Dari kedua variabel yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Jumlah Pembiayaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang berpengaruh dominan antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan mengenai DPK, NPF dan pengaruhnya terhadap Jumlah Pembiayaan mempunyai beberapa kontribusi antara lain:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menerapkan ilmu atau teori yang didapat di bangku kuliah untuk digunakan sebagai referensi ilmiah bagi kalangan akademik dan pengetahuan tambahan bagi peneliti.

2. Praktis

- a) Bagi perusahaan :

Dari variabel yang dominan dalam mempengaruhi Jumlah Pembiayaan akan memberikan manfaat bagi pihak manajemen untuk menentukan proyeksi pengucuran dana sehingga dapat meningkatkan jumlah pembiayaan.

- b) Bagi pihak lain :

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen keuangan yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya mengenai DPK, NPF dan Jumlah Pembiayaan.

c) Bagi peneliti :

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memadukan pengetahuan praktis yang ada dalam perusahaan dan teori atau pandangan ilmiah yang diperoleh ketika dibangku perkuliahan. Dan dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi bagi penelitian lanjutan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih mengetahui rincian dari penelitian, maka berikut ini disajikan sistematika pembahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang yang berupa alasan peneliti dalam memilih topik, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari kegiatan yang dilakukan, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai acuan dalam membahas dan memecahkan permasalahan yang ada. Topik yang dibicarakan pada bab ini adalah Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan Bank Syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

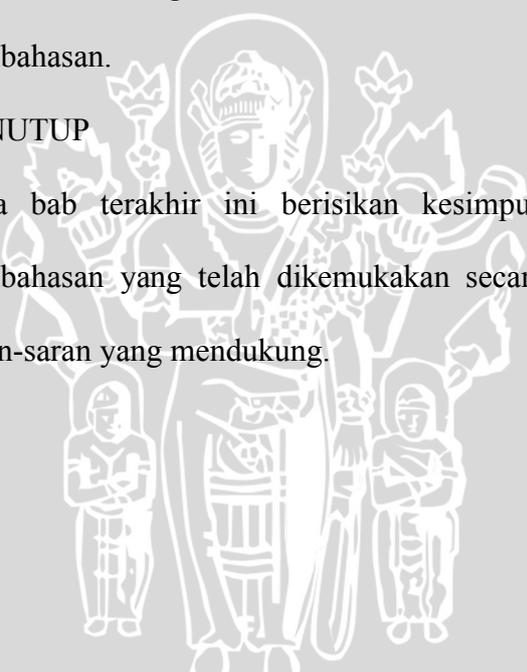
Pembahasan dalam bab ini adalah uraian mengenai: jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian data yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, analisa serta interpretasi data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan secara singkat beserta saran-saran yang mendukung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2005) dengan judul “Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Mandiri khususnya laporan Profit atau Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* periode Maret 2001-Maret 2005. Selain ketiga variabel tersebut penelitian ini menggunakan variabel *gross domestic product* (GDP) dan suku bunga kredit investasi bank konvensional untuk mengestimasi variabel profit pada titik keseimbangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi persamaan simultan, sebelum analisis tersebut dilakukan terlebih dahulu dilakukan granger test untuk menentukan variabel endogen dan eksogennya. Kemudian dilakukan uji Hausman yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat hubungan simultan antara dua model persamaan regresi yang ada. Setelah itu, model regresi persamaan simultan di analisis dengan menggunakan metode *two*

stage least squares. Model yang terbentuk dari hasil regresi persamaan simultan kemudian diuji dengan beberapa pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji t statistik, uji F, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan yaitu profit, DPK dan NPF secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 98,81% dan sisanya yaitu 1,19% dapat dijelaskan oleh variabel yang tidak masuk dalam model. walaupun variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, tapi hasil uji t menunjukkan bahwa hanya variabel profit yang signifikan mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Megaputra (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DPK, SWBI, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah di Indonesia periode 2003.10-2007.12.

Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penyaluran dana. Artinya, kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah. Sementara variabel bonus SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan namun pengaruh tersebut berpengaruh negatif. Artinya, bila bonus SWBI turun maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Variabel NPF ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2009) dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Efisiensi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2004-2008).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, efisiensi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia. Dana Pihak Ketiga yang dimaksud dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi variabel dependen adalah tabungan dan deposito *mudharabah*.

Model dan metode analisis penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan sampel seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia yang ada pada data statistic Bank Indonesia tahun 2004-2008. Selain itu, dilakukan uji F dan uji t untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga (SBI) dan efisiensi (ROA) tidak berpengaruh terhadap tabungan dan deposito *mudharabah* bank syariah.

Tabel 3
Perbedaan Penelitian Terdahulu

Aspek Beda/Sama			
Judul Penelitian	Periode Penelitian	Variabel	Jenis dan Sumber Data
Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musarakah</i> (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri)	Maret 2001- Maret 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Profit atau Bagi Hasil • Dana Pihak Ketiga • <i>Non Performing Financing</i> • <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) • Suku Bunga Kredit Investasi Bank Konvensional • Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Pembiayaan <i>Musarakah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekunder • Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia	Oktober 2003- Desember 2007	<ul style="list-style-type: none"> • DPK • SWBI • NPF • Inflasi • Pembiayaan bank syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekunder • Laporan keuangan bank syariah indonesia

Aspek Beda/Sama			
Judul Penelitian	Periode Penelitian	Variabel	Jenis dan Sumber Data
Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Efisiensi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Tabungan dan Deposito <i>Mudharabah</i> Perbankan Syariah di Indonesia (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2004-2008)	2004 – 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat suku bunga • Efisiensi • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) • Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) • Dana Pihak Ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan gabungan perbankan syariah
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan (Studi pada Perbankan Syariah Indonesia)	Januari 2007 – Juli 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pihak Ketiga • <i>Non Performing Financing</i> • Jumlah Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan gabungan perbankan syariah

B. Bank Syariah

1. Tinjauan Umum Bank Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank bagi hasil adalah bank yang dalam aktivitasnya sama dengan bank konvensional. Bedanya tidak memberi atau menarik bunga dari pinjaman bank, tetapi mendapat bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh bank (Simorangkir, 2000: 39). Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW (Muhammad, 2002:13).

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha serta kegiatan perbankan lainnya (Kasmir, 2001:38). Bank syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasional yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Menurut pandangan agama islam, didalam sistem bunga terdapat ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk mengembalikan dana yang dipinjam yang tentunya lebih banyak dari yang dipinjam. Sedangkan dalam sistem bagi hasil adanya kesepakatan antara peminjam dan yang memberi pinjaman sehingga jika ada risiko ditanggung oleh mereka berdua sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Bank islam atau yang biasa disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa yang disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

2. Tujuan Didirikannya Bank Syariah

Menurut Aziz (2001: 9) bank Islam didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dengan demikian akan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan.
- c. Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

3. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep *aqad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan syariah untuk dioperasionalkan. Menurut Aziz (2001: 23) kelima konsep tersebut adalah:

- a. Prinsip Simpanan Murni (*al-wadiah*)

Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro.

Al-wadiah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *Al-wadiah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*Operating Lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

2) *Bai'al Takjiri* atau *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada masa sewa (*Financial Lease*).

e. Prinsip Jasa (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer.

4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah di Indonesia muncul sejak tahun 1992, namun perkembangan yang sangat pesat baru terjadi sejak tahun 1999 sejak adanya undang-undang perbankan baru yang mulai menerapkan *dual banking system* di Indonesia. Sampai akhir tahun 2004 jumlah bank umum syariah sudah ada 3, yakni Bank Muamalat (BMI), Bank Syariah Mandiri

(BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Sedangkan bank konvensional yang membuka unit usaha syariah berjumlah 15. Peningkatan jumlah yang sangat besar sampai akhir tahun 2004 ini diikuti peningkatan jumlah jaringan kantor cabang dan kantor kas bank syariah di seluruh Indonesia yang mencapai 443 kantor (Bank Indonesia, 2004).

Berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan Bank Syariah Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2002, ada 3 (tiga) tahap pengembangan yang perlu untuk diimplementasikan (Bank Indonesia, 2004). Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap I (2003-2004), diarahkan untuk meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah. Implementasi inisiatif strategi pada tahap ini difokuskan pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang sehat.
2. Tahap II (2004-2008), diarahkan untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah. Implementasi inisiatif strategi pada tahap II pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang dilakukan pada tahap I dengan fokus pada upaya realisasi kegiatan yang telah direncanakan.
3. Tahap III (2008-2011), diarahkan untuk memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

Tahap I sasaran pengembangan perbankan syariah dalam Blue Print memang difokuskan pada pertumbuhan perbankan syariah, sehingga tidak mengherankan pertumbuhan perbankan syariah mencapai 88,6% dan telah

mencapai 1,3% kontribusinya terhadap perbankan nasional. Hal itu sangat kontras jika dibandingkan dengan periode awal berdirinya ketika kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sangat kecil dan kurang dari 0,05% (Sasmitasiwi dan Cahyadin, 2007).

Sasaran pengembangan selanjutnya pada tahap kedua periode 2004-2008 adalah memperkuat struktur industri perbankan. Salah satu sasaran yang harus dicapai adalah meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, dan daya saing industri perbankan syariah Indonesia (Cahyadin dan Sasmitasiwi, 2007).

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun hingga saat ini pangsa bank syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Pada tahun 2008 total aset perbankan syariah berjumlah Rp 43,47 triliun yang berarti bank syariah baru meraih pangsa pasar sekitar 2,12% dari total industri perbankan. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, perkembangan perbankan syariah negara kita masih tertinggal jauh. Malaysia dengan penduduk sebesar 25,27 juta jiwa dengan 15,27 diantaranya berpenduduk muslim, aset sektor perbankan syariahnya per juli 2008 sudah mencapai 141 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 394,66 triliun (jika 1 ringgit = Rp 2800). Nilai itu mencapai hampir 80% dari total aset perbankan Malaysia. Meskipun demikian, perbankan syariah di Indonesia tumbuh rata-rata 30%-40%. Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya

sekitar 12%. Dengan demikian, peluang bank syariah untuk terus tumbuh tinggi masih dapat berlanjut (Oktaviana, 2007).

Rencana untuk menangkap peluang bisnis, saat ini target pasar bank syariah tidak bisa hanya terbatas pada masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat non-muslim (Surya, 2009). Hal ini dilakukan agar potensi pasar yang digarap semakin luas, berkembang lebih cepat dan memberi manfaat lebih pada banyak orang. Selain itu bank syariah tidak hanya terpaku pada pola pikir yang mengedepankan masalah halal-haram dan bunga-riba dalam mengenalkan bank syariah kepada masyarakat, tetapi hendaknya berusaha untuk menonjolkan hal-hal yang lebih bersifat universal dan populer di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia bukanlah syariah loyalis, tetapi masyarakat rasional yang juga memikirkan untung-rugi jika menabung atau meminjam uang di bank syariah. Bagi masyarakat rasional, yang terpenting adalah imbal hasil yang menarik dan keuntungan-keuntungan lainnya, seperti pelayanan yang memuaskan, teknologi yang canggih, keamanan, jaringan yang luas, dan kemudahan akses (Pikir, 2004).

Bank syariah dalam menangkap peluang tersebut tentu menghadapi berbagai hambatan. Adapun beberapa penghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia menurut Surya (2009), diantaranya: (1) Aturan investasi dan perpajakan masih dinilai mengganjal berkembangnya bisnis syariah; (2) Peraturan untuk membuat iklim investasi di industri syariah masih kurang fleksibel. Aturan yang fleksibel diberlakukan di

negara lain seperti Malaysia, Singapura, China dan Jepang yang aktif mengembangkan layanan syariah; (3) Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami produk dan sistem syariah; (4) Pemahaman masyarakat terhadap bank syariah belum optimal dan menyeluruh. Hal ini mungkin disebabkan karena diseminasi atau sosialisasi masih kurang untuk memaparkan keunggulan produk syariah; (5) Masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa bank syariah bersifat eksklusif dalam artian bahwa bank syariah hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja.

Selain dari faktor penghambat, ada pula faktor pendukung perkembangan bank syariah. Adapun faktor pendukung perkembangan bank syariah di Indonesia diantaranya menurut Surya (2009), yaitu: (1) Telah lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Isinya antara lain tentang keharusan melepas (*spin off*) divisi syariah dalam 15 tahun, atau ketika pangsa pasar syariah mencapai 50%; (2) Diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada agustus 2008; (3) Beroperasinya lembaga-lembaga pendidikan syariah dan pendirian Fakultas Ekonomi Syariah oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia untuk mengisi kekurangan SDM sektor perbankan syariah; (4) Beroperasinya lembaga keuangan hasil *joint venture* dengan pemodal timur tengah. Hal ini membuka jalan masuknya dana-dana investasi berbasis syariah dari timur tengah; (5) Pertumbuhan indikator keuangan

syariah di Indonesia tertinggi dibanding negara lain. Hal ini bisa menjadi modal bagi pertumbuhan yang pesat di masa mendatang. Perkembangan jumlah perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
PERKEMBANGAN JUMLAH BANK SYARIAH
DI INDONESIA DARI TAHUN 2006-2009

Jenis Bank	2006	2007	2008	2009
Bank Umum Syariah	3	3	5	6
Unit Usaha Syariah	20	26	27	25
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	105	114	131	138

Sumber: Bank Indonesia, 2010

C. Penyaluran Dana Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Antonio (2001: 160) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi *defisit unit*. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (Muhammad, 2003:260).

2. Macam-macam Pembiayaan

Menurut Antonio (2001: 160) berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. **Pembiayaan Produktif**
Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk peningkatan baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. **Pembiayaan Konsumtif**
Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. **Pembiayaan Modal Kerja**
Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang.
- b. **Pembiayaan Investasi**
Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan berjangka waktu yang cukup lama. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah pada umumnya menggunakan skema *musyarakah* atau *mudharabah*.

Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skim pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan angsuran
- b. Sewa beli
- c. *Decreasing participation*
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jasa

Secara umum macam-macam pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



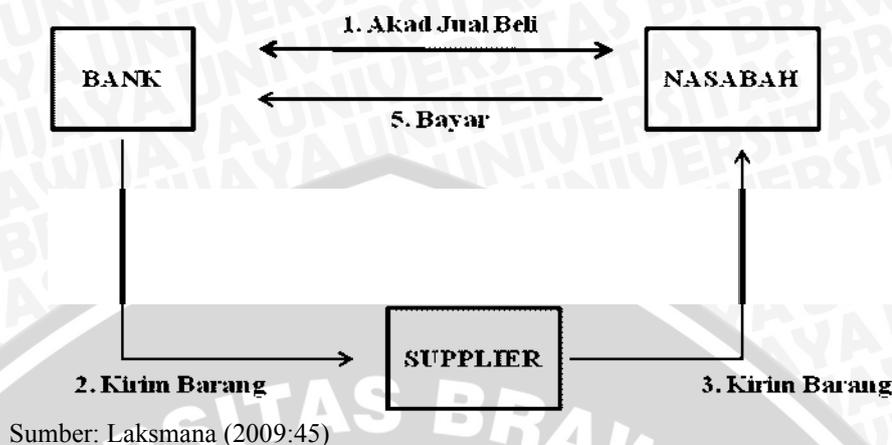
Sumber: Antonio (2001:161)

Gambar 1
Macam-macam Pembiayaan

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

1) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad *murabahah* ini (Antonio, 2001:101). Menurut Karim (2003:84) pembiayaan *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat dirubah. Kemudian bank melakukan pembelian barang ke produsen barang dikirim ke nasabah. Dalam perbankan, *murabahah* dilaksanakan dengan menyerahkan barang dengan segera setelah akad sedangkan cara pembayaran secara berangsur atau cicilan. Pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:



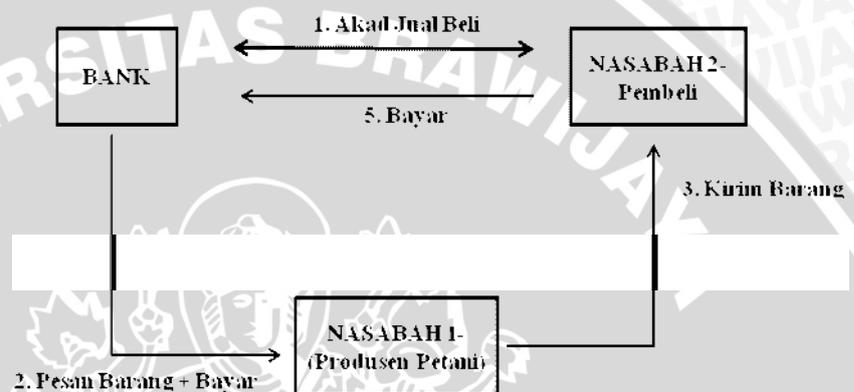
Gambar 2
Skema Murabahah

2) Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera sebelum *muslam fiih* diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Piutang *salam* harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan penerimaan dalam bentuk tunai. Hutang *salam* adalah modal usaha *salam* yang diterima oleh bank sebagai penjual dari pembeli. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Barang yang diterima harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diterima bank salah atau cacat maka penjual (*supplier*) harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Apabila nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai akad maka bank tidak mengakui sebagai keuntungan *salam*. Bank sebagai pembeli dapat

meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Barang pesanan yang disepakati antara penjual dan pembeli harus diketahui karakteristiknya secara umum jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai karakteristiknya maka penjual harus bertanggung jawab.

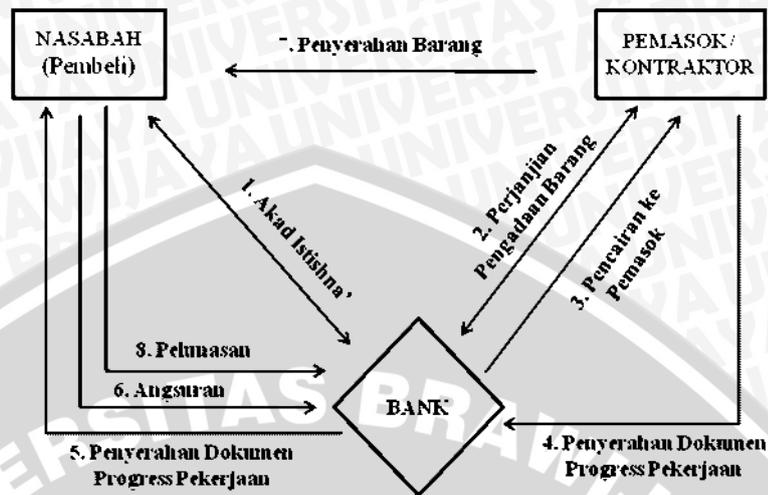


Sumber: Laksmana (2009:48)

Gambar 3
Skema Salam

3) *Istishna'*

Transaksi *istishna'* merupakan suatu kontrak perjanjian jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam kontrak ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran yaitu apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pada waktu masa yang akan datang (Antonio, 2001:113).



Sumber: Laksmana (2009:50)

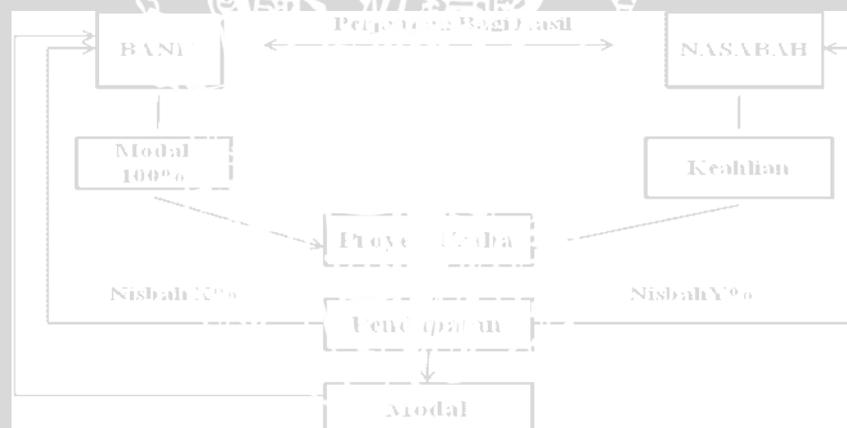
Gambar 4
Skema Istishna'

b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Prinsip pembiayaan *mudharabah* ini, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian PLS (*profit and loss sharing*) dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biyai. *Mudharib* (pengusaha) menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara *mudharabah*. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* (pemilik modal) dan bagian yang telah disepakati sebelumnya (Lewis & Algaoud, 2003:66).



Sumber: Laksmiana (2009:56)

Gambar 5
Skema Mudharabah

2) Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

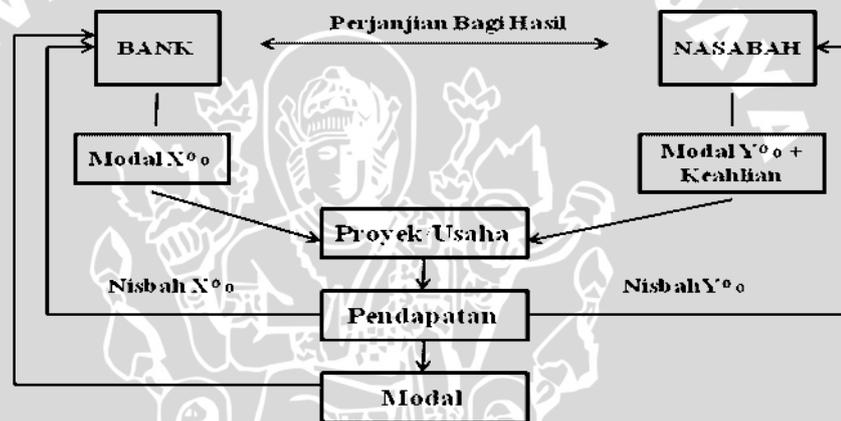
memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan atau kondisi yang lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan keuntungan dan kerugian.

Musyarakah dapat berupa *musyarakah* permanen maupun *musyarakah* menurun. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*. Sedangkan di dalam *musyarakah* menurun, jumlah modalnya secara berangsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.

Sistem pembiayaan *musyarakah* merupakan sistem pembiayaan dimana setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra

lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh tidak dipenuhinya persyaratan sesuai akad; tidak terdapat kondisi *force majeure* (keadaan memaksa) dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau hasil putusan dari badan *arbitrase* atau pengadilan.



Sumber: Laksmana (2009:58)

Gambar 6
Skema Musyarakah

c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa (Ijarah)

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* berarti *al-iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Pengertian pemberian sewa-menyewa (*ijarah*) dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu



barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Apabila pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah.

Menurut Laksmana (2009:52) ada dua jenis *ijarah*:

- 1) *Ijarah* murni, suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek tetap dimiliki oleh si pemilik.
- 2) *Ijarah* muntahiya bi tamlik (IMBT), suatu transaksi sewa menyewa dimana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*.



Sumber: Laksmana (2009:53)

Gambar 7
Skema IMBT

D. Pembiayaan

Penyaluran dana oleh perbankan kepada masyarakat dalam pengertian penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan konvensional biasa diistilahkan dengan kredit. Kredit berasal dari kata lain *credere* atau percaya. Untuk membedakan istilah penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional dan yang dilakukan oleh bank syariah, Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menggunakan istilah kredit

untuk penyaluran dana yang dilakukan bank konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah.

Secara lengkap pengertian kredit yang terdapat pada pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti terdapat pada pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan merupakan sumber investasi, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004:107).

E. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pengambilan keputusan penyaluran dana memperhatikan faktor-faktor informasi internal maupun eksternal bank. Menurut Wibowo (2007:93) Informasi internal yang berhubungan dengan penyaluran dana yang dilakukan salah satunya adalah besarnya dana pihak ketiga (DPK). Bank syariah

merupakan penghimpun dana pihak yang *surplus* dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola secara hukum syariah. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam rangka membiayai kegiatan operasinya (Kasmir 2005:35). Dana yang dihimpun tersebut terdiri dari dana pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (dana dari bank dan bukan bank), atau dana dari Bank Indonesia, dan dana dari pihak ketiga yaitu nasabah (Wibowo 2007:15). Dana pihak ketiga merupakan dana yang ditiptkan pada bank. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu (Arifin 2006:50).

Menurut Arifin (2006:41-42), yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Giro, giro yang pada bank syariah disebut giro *wadi'ah* umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasi bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan, dimana dana diterima bank sebagai simpanan untuk keamanan (*wadi'ah yad al dhamanah*).
2. Tabungan, tabungan di bank konvensional berbeda dari giro di mana ada beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank. Namun, dalam kasus pada bank Islam Malaysia Berhad terdapat dua jenis tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.

3. Deposito, deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan dan nisbah bagi hasil atau *mudharabah fee* disetujui antara bank dan depositor (Arifin 2006:42).

Tabungan (DPK) merupakan sumber dana terbesar bagi bank syariah dan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank, sebab tanpa adanya dana bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga *intermediary*.

F. Non Performing Financing (NPF)

Adapun informasi internal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penyaluran dana menurut Wibowo (2007:93) adalah Informasi *Non Performing Financing* atau rasio pembiayaan dengan total pembiayaan. Besarnya pembiayaan bermasalah atau bahkan macet akan mempengaruhi keputusan bank dalam masalah penyaluran dana.

Penilaian aspek kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Aspek ini menunjukkan

kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Penilaian aspek kualitas aset ditunjukkan dengan rasio rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu perbandingan pembiayaan yang bermasalah (kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet) dengan total pembiayaan.

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

(Wibowo, 2007:33)

Pembiayaan pada bank syariah rawan terhadap risiko yang tidak hanya dapat merugikan bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Suatu pembiayaan harus dikelola dengan baik untuk meminimalisasi risiko yang ada. Tidak dipungkiri bahwa setiap bank mengalami suatu pembiayaan yang bermasalah dari nasabahnya. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila pembiayaan yang dilakukan bank syariah kolektibilitasnya kurang lancar (golongan 3), diragukan (golongan 4) dan macet (golongan 5).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 bahwa Penyaluran dana/pembiayaan dapat dikatakan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet dapat dilihat dari tiga aspek. Aspek tersebut yaitu prospek usaha, kondisi keuangan

nasabah dan kemampuan membayar. Ketentuan penggolongan kualitas penyaluran dana adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Penyaluran Dana

Kategori	Prospek Usaha
Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 2. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3. Persaingan yang terbatas termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 4. Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). 5. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 6. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
Dalam Perhatian Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 2. Posisi di pasar baik tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 4. Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman tapi memiliki kemampuan). 5. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 6. Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 2. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 4. Manajemen cukup baik (manajemen independen, pengalaman, tapi kurang memiliki kemampuan). 5. Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 6. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha nasabah menurun. 2. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 3. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 4. Manajemen kurang berpengalaman.

Kategori	Prospek Usaha
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih dan kemungkinan besar usaha akan berhenti. 2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. 3. Manajemen sangat lemah. 4. Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah. 5. Terjadinya pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

Kategori	Kondisi Keuangan Nasabah
Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan laba tinggi dan stabil. 2. Permodalan kuat. 3. Likuiditas dan modal kerja kuat. 4. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan. 5. Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.
Dalam Perhatian Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 2. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan modal apabila diperlukan. 3. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 4. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa mendatang. 5. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan laba lebih rendah dari target laba. 2. Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 3. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 4. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil atau sebagian angsuran pembiayaan mudharabah. 5. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. 6. Perpanjangan pembiayaan untuk menutupi kesulitan keuangan.

Kategori	Kondisi Keuangan Nasabah
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan laba sangat kecil atau negatif. 2. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 3. Rasio utang terhadap modal tinggi. 4. Likuiditas sangat rendah. 5. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil. 6. Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing. 7. Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengalami kerugian yang besar. 2. Nasabah tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. 3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. 4. Kesulitan likuiditas. 5. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi. 6. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing. 7. Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional. 8. Sulit diatasi.
Kategori	Kemampuan Membayar
Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan. 2. Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 3. Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.
Dalam Perhatian Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari. 2. Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. 3. Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat. 4. Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian yang tidak prinsipil.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau realisasi pendapatan (RP) diatas 30% proyeksi pendapatan (PP) sampai dengan 90% PP ($30\% PP < RP \leq 90\% PP$). 2. Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 3. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah. 4. Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan tidak prinsipil. 5. Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

Kategori	Kemampuan Membayar
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan atau $RP \leq 30\%$ PP sampai dengan tiga periode pembayaran. 2. Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 3. Dokumentasi pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 4. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok/utama dalam pembiayaan.
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan <i>mudharabah</i> yang telah melampaui 180 hari dan atau $RP \leq 30\%$ PP lebih dari tiga periode pembayaran. 2. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. 3. Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada

Sumber : Triandaru dan Budisantoso (2006)

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) bank syariah dikarenakan kesulitan-kesulitan keuangan (Arifin, 2006:222). Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dibagi dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor yang paling dominan, nasabah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* yaitu faktor manajerial. Dari segi faktor manajerial dapat dilihat beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen

perusahaan. Timbulnya *Non Performing Financing* pada bank syariah karena faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. (Arifin 2006:222).

G. Tinjauan Teoritis Keterkaitan Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan

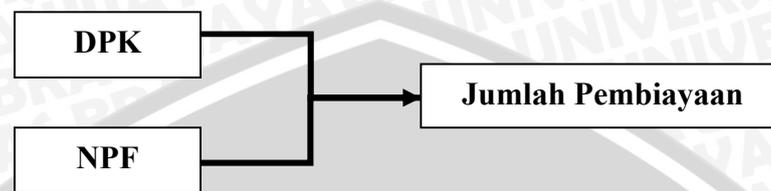
Dalam melakukan kegiatan usahanya bank harus mempunyai dana agar dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank akan dialokasikan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, selain itu pengalokasian dana tersebut mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling bisa diandalkan oleh bank, keberadaan DPK sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kegiatan pembiayaan. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan akan mendapatkan hasil. Semakin besar DPK yang bisa dihimpun oleh bank syariah maka penyaluran dana juga akan semakin besar sehingga hubungan antara DPK dan pembiayaan adalah positif.

Faktor lain yang tidak dapat dihindari oleh bank syariah adalah adanya risiko pembiayaan (NPF). Risiko pembiayaan terjadi ketika bank tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang disalurkan atau investasi yang sedang dilakukannya. Risiko pembiayaan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan ketika tingkat jumlah pembiayaan bermasalah menjadi besar, semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Apabila NPF bank syariah tinggi maka bank syariah sedang dalam kondisi dimana tingkat likuiditasnya rendah sehingga bank syariah cenderung mengurangi atau tidak menyalurkan, pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku keputusan manajemen bank syariah dalam penyaluran pembiayaan. Sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka semakin kecil dana (pembiayaan) yang disalurkan oleh bank syariah.

H. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2008:51) adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Hipotesis harus dibuktikan kebenarannya karena masih merupakan dugaan. Suatu hipotesis dikatakan jawaban sementara karena disusunnya hanya berdasarkan teori yang relevan saja, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Menurut Nazir (2003:123) mengemukakan, "Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan membuat generalisasi yang khas".

Pada penelitian ini model hipotesis yang akan di uji adalah sebagai berikut:



Gambar 8
Model Hipotesis

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah rasio DPK dan NPF sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Jumlah Pembiayaan. Berdasarkan model konsep dan hipotesis di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah :

- a. H_0 : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel DPK dan NPF terhadap Jumlah Pembiayaan.
- b. H_1 : Ada pengaruh yang dominan dari variabel DPK atau NPF terhadap Jumlah Pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah (Hasan, 2002:10). Sekaran (2006:7) mendefinisikan penelitian bisnis sebagai penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan serta berlandaskan teori yang diuraikan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Menurut Singarimbun dalam Singarimbun dan Effendi (Ed, 2008:5), *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang sama. Alasan penggunaan jenis penelitian *explanatory research* ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK, NPF terhadap Jumlah Pembiayaan. Selain itu dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan dapat diketahui dengan jelas bagaimana hubungan antar variabel yang satu dengan lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Bank Indonesia Surabaya yang beralamatkan di Jalan Pahlawan 105 Surabaya. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa Bank Indonesia memiliki data yang sangat memadai khususnya yang berhubungan dengan sistem perbankan dan laporan keuangan khususnya mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah.

C. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

Menurut Sugiyono (2008:58) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel juga didefinisikan sebagai konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai-nilai dalam bentuk bilangan, atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum (Hasan, 2002:17).

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Variabel bebas (X), adalah variabel yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas (X), Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1), *Non Performing Financing* (NPF) (X_2).

- b. Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai variabel terikat adalah Jumlah Pembiayaan bank syariah.

2. Definisi Operasional

Menurut Nazir (2003:126) definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional tersebut antara lain:

- a. Dana Pihak Ketiga

Didefinisikan sebagai rata-rata dana milik masyarakat yang disimpan dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan berdasarkan jumlah bank tiap bulan.

- b. *Non Performing Financing*

Adalah rata-rata perbandingan kredit/pembiayaan bermasalah (kredit dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dengan total kredit. Data yang digunakan adalah data perhitungan bulanan yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan berdasarkan jumlah bank tiap bulan.

- c. Jumlah Pembiayaan

Didefinisikan sebagai rata-rata jumlah total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia dan dinyatakan dalam satuan rupiah dan berdasarkan jumlah bank tiap bulan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan dengan jelas sebagai objek penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian (Suhardjono, 2007:48). Berdasarkan hal tersebut, maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia yang ada pada data statistik Bank Indonesia periode Januari 2007 – Juli 2010 yang berjumlah 43 laporan keuangan gabungan.

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang mewakili populasi sebagai data empirik penelitian (Suhardjono, 2007:48). Dikarenakan keterbatasan data, maka penentuan sampel adalah 100% atau seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan *time series* yang diperoleh dari data statistik Bank Indonesia. Data-data tersebut berupa data bulanan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah. Diharapkan data ini dapat mewakili data secara umum karena pada kenyataannya jumlah bank syariah mengalami fluktuasi artinya jumlah bank tiap bulan dapat bertambah, berkurang atau bahkan berganti komposisinya. Atas dasar alasan tersebut Bank Indonesia menggunakan

sistem perhitungan rata-rata dalam mengasumsikan laporan keuangan bank syariah.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Hasan (2008:83), metode pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen tertentu sebagai pelengkap dan penunjang penelitian.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, dan analisis statistik inferensial.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel. Analisis ini dipakai untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan distribusi item masing-masing variabel. Data yang dikumpulkan diedit dan ditabulasikan dalam tabel, kemudian pembahasan data dalam angka dan persentase.

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik Inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini digunakan analisis linier berganda digunakan untuk

mengetahui pengaruh antar variabel bebas yaitu DPK (X_1), dan NPF (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Pembiayaan (Y). Dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana dalam penelitian ini :

- Y = Variabel Terikat (Jumlah Pembiayaan)
- a = Titik intercep atau constant, yaitu nilai perkiraan y jika $x = 0$
- $b_1, b_2, b_3, b_4/b_i$ = Koefisien regresi
- X_1 = *DPK*
- X_2 = *NPF*
- e = Kesalahan pengganggu, artinya nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan.

(Sugiyono, 2008:277).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Linieritas

Linieritas merupakan hal yang sangat penting dalam analisis regresi linier. Yang dimaksud dengan linieritas adalah bahwa nilai rata-rata variabel respon (y) merupakan fungsi garis lurus dari variabel prediktor (x). Dalam analisis regresi linier berganda digambarkan

bahwa antara variabel respon dan variabel prediktor mempunyai hubungan pengaruh linier yang ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon_i$$

Menurut Hadi dalam Maria (2007) Pengujian linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Disamping itu dapat digunakan untuk mengetahui taraf signifikansi penyimpangan linieritas hubungan tersebut. Apabila penyimpangan yang ditemukan tidak signifikan maka dapat disimpulkan hubungan antara variabel respon dan prediktor linier.

Pengujian Linieritas dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Uji hipotesis untuk koefisien korelasi :

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

statistik uji yang digunakan sama seperti pengujian hipotesis $\beta = 0$

, yaitu :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

tolak H_0 jika $|t| \geq t_{n-2}^{\alpha/2}$, artinya hubungan antara dua variabel nyata dan linier.

2. Mengamati *scatter-plot*, di mana hasilnya menunjukkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor relatif normal (berbentuk linier/garis lurus).
3. Uji F untuk data–data yang nilainya menyimpang atau tidak cocok dengan persamaan garis regresi yang didapatkan. Jika hasil uji F signifikan ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{table}}$) maka dapat disimpulkan asumsi linieritas tidak terpenuhi, namun jika uji F pada data-data yang menyimpang tersebut tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa asumsi linieritas telah dipenuhi. Statistik uji F didapatkan dari rumus

$$\frac{\text{Kuadrat Tengah Penyimpangan}}{\text{Galat Penyimpangan}}$$

(Hadi,2000)

4. Menggunakan *curve estimation*, jika tes bentuk kurva linier pada *curve estimation* signifikan ($p\text{-value} < \alpha$) maka dapat disimpulkan asumsi linieritas terpenuhi. Namun jika tes bentuk kurva linier tidak signifikan maka asumsi linieritas tidak terpenuhi sebab dimungkinkan adanya bentuk hubungan yang lebih cocok antara variabel respon dan prediktor atau tidak terdapat hubungan linier yang nyata antara variabel respon dan predictor.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006:110).

Menurut Ghozali (2006:114), untuk menguji normalitas residual, dapat dilakukan dengan melakukan Uji *Kolmogrof-Smirnov*. Hipotesis pengujiannya yaitu :

H_0 : data residual berdistribusi normal.

H_1 : data residual tidak berdistribusi normal.

Pedoman yang digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis jika hipotesis H_0 yang diusulkan :

1. H_0 diterima jika nilai *p-value* pada kolom *Asimptotic Significant (2 tailed)* $>$ *level of significant (α)*.
2. H_0 ditolak jika nilai *p-value* pada kolom *Asimptotic Significant (2 tailed)* $<$ *level of significant (α)*.

(Nugroho,2005:112).

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi Autokorelasi, maka dinamakan problem Autokorelasi. Autokorelasi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006:95).

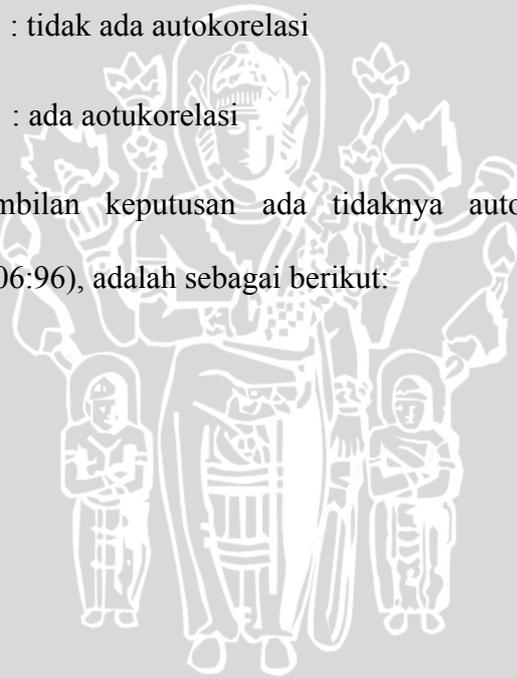
Menurut Nugroho (2005:59) cara mudah untuk mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin Watson. Model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah *No Autocorelasi*. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel dl dan du serta nilai k (jumlah variabel independen).

Adapun hipotesis yang melandasi pengujian menurut Ghozali (2006:96) adalah sebagai berikut :

$H_0 (r = 0)$: tidak ada autokorelasi

$H_1 (r \neq 0)$: ada autokorelasi

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2006:96), adalah sebagai berikut:



Tabel 6
Keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak menghasilkan kesimpulan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada auto korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak menghasilkan kesimpulan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima	$du < d < 4 - du$

d. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, bisa dilakukan antara lain dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai Tolerance. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2006:91).

e. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006:105).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melakukan uji glejser. Uji glejser dilandasi pada hipotesis :

H_0 : *variance* residual homogen

H_1 : *variance* residual tidak homogen

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada nilai indikasi terjadi secara heterokedastisitas, namun jika tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Pada uji glejser, hasil tampilan output SPSS akan menunjukkan apakah ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (Abs Ut) (Ghozali, 2006:108) .

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas yaitu DPK, NPF secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Pembiayaan. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil F-test ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. ANOVA (*Analysis Of Variance*) atau analisis ragam untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh dari variabelnya.

Kaidah pengujian signifikansi: jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai *p-value* pada kolom *sig.* > *level of significant* (α) maka H_0 ditolak (signifikan). Alat uji F ini digunakan untuk menguji hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap Jumlah Pembiayaan.

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap Jumlah Pembiayaan.

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika H_0 yang diusulkan :

- 1) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau nilai p -value pada kolom $sig. >$ level of significant (α).
- 2) H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau nilai p -value pada kolom $sig. <$ level of significant (α).

Sedangkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis H_1 yang diusulkan :

- 1) H_1 diterima $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai p -value pada kolom $sig. <$ level of significant (α).
- 2) H_1 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai p -value pada kolom $sig. >$ level of significant (α).

F_{tabel} dapat diketahui dengan melihat terlebih dahulu df_1 dan df_2 .
 $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$, k adalah jumlah variabel dependen dan independen. Signifikan di sini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak (Nugroho, 2005:53).

b. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara statistik yang dilakukan terhadap data-data yang berhubungan dengan permasalahan adalah pengujian dengan uji signifikan, untuk menguji secara statistik harus melalui proses yang disebut testing hipotesis.

Untuk pengujian parsial ini ada empat hipotesis sesuai variabel yang akan diamati. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} akan dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis, apabila:

Alat Uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga terhadap Jumlah Pembiayaan

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan.

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan.

2. Variabel *Non Performing Financing* terhadap Jumlah Pembiayaan

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel *Non Performing Financing* secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan.

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel *Non Performing Financing* secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan.

Dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 : $b_i = 0$ yang artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. $H_a = b_i \neq 0$ yang artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian melalui uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas t masing-masing variabel bebas dengan nilai $\alpha = 0,05$.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh /pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji pada output SPSS dapat dilihat pada tabel *Coeficients*. Nilai dari uji t-test dapat dilihat

dari *p-value* (pada kolom *sig.*) pada masing-masing variabel independen, jika *p-value* lebih dari *level of significant* yang ditentukan, atau t_{hitung} (pada kolom *t*) lebih besar dari t_{tabel} . Signifikan disini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak (Nugroho, 2005:54).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui sampai sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinan atau penentuan R^2 , yang berguna untuk mengukur besarnya proporsi atau presentase jumlah variasi dan variabel terikat, atau untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai koefisien determinasi sebesar 1 (100%), menunjukkan adanya hubungan yang sempurna, sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0 menunjukkan tidak terdapat hubungan antar variabel independen dengan variabel yang diprediksi (Gujarati, 2003:45).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Indonesia

De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828 sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada 1953 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1968, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Baru pada 1999 babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU

No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Tahun 2004 Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

2. Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

3. Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

4. Nilai-nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan.

5. Status

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Selain itu, Bank Indonesia juga sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

6. Tujuan

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia

serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

7. Tugas

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bank Indonesia mengemban tiga tugas yang dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia, yaitu:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien (Bank Indonesia, 2010).

B. Gambaran Umum Sampel Perbankan Syariah

1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang secara penuh bertransaksi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha. Bank umum pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan belum ada penambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-

satunya bank syariah. Baru pada 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank Mega Syariah pada 2001. Memasuki tahun 2009 ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah.

Saat ini, jumlah BUS yang beroperasi menjadi 5 bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank umum syariah (BUS) menerapkan sistem independen pada sistem perbankan syariahnya. Sementara itu jumlah kantor bank syariah saat ini tercatat sebanyak 908 kantor ditambah *channeling* sebanyak 1.452 kantor. Bank Syariah diperbolehkan untuk mendirikan unit pelayanan dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia atau satu provinsi. Dengan ini diharapkan terjadi proses efisiensi dan penyederhanaan skala jaringan kantor bank syariah (www.datacon.co.id).

Berikut beberapa profil Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia:

a. Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan

nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia *Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang

tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh Alpha South East Asia (Hong Kong) (www.muamalatbank.com).

b. Bank Syariah Mandiri

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis ekonomi dan moneter. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (www.syariahmandiri.co.id).

c. Bank Syariah Mega Indonesia

Perjalanan PT. Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa Perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum

Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

Komitmen penuh PT. Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan PT. Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki semboyan "untuk kita semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Syariah Mega Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Syariah Mega Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 15 jaringan kerja yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa (www.bsmi.co.id).

d. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia, pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda-tangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp. Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi SH di Jakarta.

Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia ke dalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Adapun

yang menjadi pemegang saham BRI Syariah adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 99,99967%, Yayasan kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033% (<http://www.linkedin.com>).

e. Bank Syariah Bukopin

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT. Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Komitmen penuh dari PT. Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin (<http://www.syariahbukopin.co.id>).

f. Bank Panin Syariah

PaninBank Syariah sebelumnya bernama PT Bank Harfa yang berkedudukan di Surabaya. perubahan status menjadi Bank Panin Syariah ini sudah mendapat persetujuan dari BI melalui surat Keputusan BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Kini Kantor

pusat PaninBank Syariah telah dipindahkan ke Jakarta dengan 4 kantor cabang di Jakarta, Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. PaninBank Syariah mulai beroperasi sebagai bank umum dengan prinsip syariah pada 2 Desember 2009 (<http://www.kabarbisnis.com>).

g. Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah (d/h. PT. Bank Swaguna) didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80 % oleh PT. Bank Victoria International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2007. September 2007 Bank telah meningkatkan modal disetor menjadi Rp 90 milyar dan pada Maret 2008 modal disetor Bank meningkat menjadi Rp 110 milyar. 19 Agustus 2009. PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. 1 April 2010 beroperasi secara penuh dengan sistem syariah. Bank memiliki satu (1) Kantor Pusat, lima (5) kantor cabang, dua (2) kantor cabang Pembantu (<http://www.bankvictoriasyariah.co.id>).

h. BCA Syariah

Mengikuti jejak beberapa bank lain yang membidik pangsa pasar syariah, BCA kini membuka layanan BCA Syariah. PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) secara resmi beroperasi sejak tanggal 05 April

2010. Pada tahap awal BCA Syariah akan didukung oleh 11 kantor cabang, 9 cabang di Jakarta dan 2 cabang di Surabaya.

BCA Syariah yang merupakan konversi dari Bank UIB, telah mengantongi ijin operasional sebagai bank syariah pada tanggal 2 Maret 2010 lalu. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010, maka Bank UIB telah selesai dikonversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah pada 3 Maret 2010. Dengan mengantongi ijin BI tersebut, hari ini Bank Syariah akan mulai beroperasi sebagai pemain baru dalam industri perbankan Islam dengan mengusung visi utama yaitu “Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat” (<http://rizki.situsmesin.com>).

i. Bank Jawa Barat dan Banten syariah

Bank Jabar Banten merealisasikan komitmennya dalam pengembangan usaha syariahnya dengan melepaskan unit usaha syariahnya menjadi bank umum syariah. Secara resmi bank umum syariah yang dimiliki Bank Jabar Banten dan Perusahaan Daerah Banten *Global Development* dengan komposisi saham 99% dan 1% ini beroperasi 6 Mei 2010.

Sejak tahun 2000, Bank Jabar Banten menjadi pelopor pendirian unit usaha syariah. Dan sekarang setelah 10 tahun, kembali menjadi pelopor perbankan nasional dengan pendirian Bank Jabar Banten Syariah melalui *spin off* unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah. Berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2009, Dana Pihak Ketiga

yang dikelola unit usaha syariah Bank Jabar Banten meningkat Rp 384,89 miliar atau tumbuh 145 persen menjadi Rp 649 miliar. Aset meningkat Rp 307,91 miliar atau tumbuh 41 persen menjadi Rp1,05 triliun.

Pembiayaan meningkat Rp 113,45 miliar atau tumbuh 19 persen menjadi Rp 706,98 miliar. Laba meningkat Rp 9,93 miliar atau tumbuh 42 persen menjadi Rp 33,18 miliar. Dengan menjadi bank umum syariah yang mandiri diharapkan Bank Jabar Banten Syariah dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya dan melanjutkan upaya penguatan bisnis perbankan syariah secara baik (www.mediaindonesia.com).

j. BNI Syariah

Selain adanya *demand* dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi “*universal banking*”, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah,

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah. Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang

signifikan. Asset meningkat dari Rp. 160 Milyar di Tahun 2001 menjadi 460 Milyar di Tahun 2002. Seiring dengan itu kinerja usaha juga mengalami peningkatan dengan pencapaian laba sebesar Rp. 7,2 Milyar dibanding tahun 2001 yang masih rugi sebesar 3,1 Milyar. Dana Pihak Ketiga meningkat sebesar 88% dari tahun 2001 menjadi Rp. 205 Milyar. Pembiayaan juga meningkat 163% menjadi 292,9 Milyar. Data di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang baik dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Pada akhir tahun 2003 Dana Pihak Ketiga meningkat 97.56% menjadi Rp 405 milyar, pembiayaan meningkat sebesar 67.57% menjadi Rp 490 milyar sedangkan laba mencapai peningkatan sebesar 281.39% menjadi Rp. 27.46 milyar. Pada tahun 2004 BNI Syariah mendapatkan penghargaan *The Most Profitable Islamic Bank* untuk yang kedua kalinya, penghargaan ini berdasarkan penilaian oleh Karim Business Consulting bekerja sama dengan Majalah Manajemen dan PPM (www.bnisyariah.tripod.com).

2. Unit Usaha Syariah

Pada dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS). Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional, dimana bank konvensional masih menerapkan sistem riba.

Adapun modal yang diperlukan adalah sebesar Rp 2 miliar untuk pembukaan UUS, Rp 1 miliar untuk kantor cabang dan Rp 500 juta untuk kantor cabang pembantu. Saat ini terdapat sekitar 12 bank konvensional yang mendiversifikasikan bisnisnya dengan memberikan layanan syariah dengan membuka UUS. Diantaranya adalah PT Bank IFI, PT. Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, dan HSBC, BTN dan Bank Permata. Sementara itu, berdasarkan survei Bank Indonesia selama dua tahun terakhir ini minat masyarakat terhadap bank syariah di daerah cukup besar. Dalam tiap provinsi yang mayoritas muslim, hampir separuhnya menghendaki pelayanan perbankan syariah. Sekitar 11% sudah mengerti produk dan layanan yang ditawarkan.

Besarnya kebutuhan layanan syariah di daerah, mendorong sejumlah bank daerah membuka UUS. Saat ini terdapat 16 BPD sudah membuka cabang syariah, yaitu Bank NTB, Bank Sumut, Bank Aceh, Bank Sumsel dan lain-lain. Sebelumnya sudah ada unit syariah BPD DKI Jakarta, BPD Jabar, BPD Riau, BPD Kalbar, BPD Kalsel dan BPD Sulsel.

Pada 2009 UUS berkurang 2, karena Bukopin dan BRI melakukan *spin off* dari unit usaha ke bank umum. Kedua UUS tersebut kini masing-masing menjadi PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah. Dengan pemisahan UUS ini, diharapkan bank penerima pemisahan bisa meningkat prospek bisnisnya, meningkatkan struktur permodalan, meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra, serta meningkatkan produktivitas dan

efisiensi. Dilepasnya UUS akan membuat BRI bisa makin memfokuskan usaha di bidang UMKM.

Menurut data BI, hingga Maret 2008, jumlah bank yang memiliki UUS terdapat 28 bank, bertambah dua bank dibandingkan posisi akhir Desember yaitu UUS Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (www.datacon.co.id).

Adapun beberapa profil Unit Usaha Syariah antara lain:

a. Danamon Syariah

Peresmian Bank Danamon Syariah ditandai dengan peresmian Cabang Perdana di Ciracas Jakarta Timur yang diresmikan pada tanggal 14 Mei 2002 oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM, Chairul Fadjar Sofyan yang mewakili Menteri Negara Koperasi dan UKM. Sementara itu, sampai dengan September 2003, Bank Danamon Syariah telah mengumpulkan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp 127 miliar dan mengucurkan pembiayaan sekitar Rp 113 miliar. Dari total pembiayaan tersebut, sekitar 40% atau sekitar Rp 44 miliar disalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), baik berupa barang modal maupun investasi. Total penyaluran pembiayaan Bank Danamon Syariah tersebut meningkat lebih dari 400% jika dibandingkan dengan Desember 2002 (danamon.php.htm).

b. Permata Bank Syariah

PermataBank Syariah didirikan pada tanggal 10 November 2004. PermataBank Syariah saat ini telah memiliki 3 Kantor Cabang dan

5 Kantor Cabang Pembantu. Awal maret tahun 2006 seluruh cabang konvensional PermataBank Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya telah dapat menerima layanan transaksi Syariah. Dengan 276 cabang (termasuk cabang pembantu, kantor kas dan cabang syariah), 234 *office channeling* syariah, didukung oleh 549 ATM di 55 kota di seluruh Indonesia, PermataBank yakin akan dapat meningkatkan komitmen untuk menyediakan solusi inovatif yang dapat menjawab kebutuhan finansial nasabah PermataBank (www.permata.html).

c. BII Syariah

BII Syariah berdiri pada tanggal 20 mei 2003. BII Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang menjalankan operasionalnya secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Penyedia jasa keuangan Syariah yang terintegrasi (*Integrated Islamic Financial Service*) dengan berbagai pilihan pelayanan dari reguler sampai dengan platinum. BII Syariah memiliki layanan perbankan syariah yang *excellent* dengan melaksanakan fungsi bisnis dan operasional bank secara efisien, efektif, aman dan berkualitas sehingga menjadi bank lokal terbaik yang diakui memiliki kualitas pelayanan dan inovasi produk berstandar internasional (www.bankbii.com).

d. CIMB Niaga Syariah

CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Khusus didirikan sebagai respon terhadap bisnis perbankan Syariah yang berkembang di Indonesia dan meningkatnya permintaan pelanggan untuk

transaksi perbankan Syariah. Teknologi canggih yang dikombinasikan dengan kualitas pelayanan yang terbaik adalah konsep modern yang diadopsi oleh CIMB Niaga Syariah. Transaksi perbankan Syariah yang ditawarkan oleh CIMB Niaga Syariah akan, insya Allah, membawa rasa keamanan, kenyamanan, keadilan dan kenyamanan kepada semua stakeholder. Segmentasi: CIMB Niaga Syariah berfokus pada pelayanan kepada Terapung Massa (moderat yaitu) di Tengah dan Kelas Menengah Atas Individu segmen, yang menuntut layanan yang berkualitas tinggi, dan segmen *Business Banking* melalui penyediaan inovatif, produk-produk kelas satu (Cimbinfo-7-188.html).

e. HSBC Syariah

Sejak Tahun 2003 lalu, HSBC mulai melirik bisnis perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bank asing, HSBC adalah bank pertama yang memiliki unit usaha syariah yang diberi nama HSBC AMANAH SYARIAH. Tanggal 20 Agustus 2010 HSBC Amanah Syariah membuka kantor cabang pertamanya di Indonesia *Bank* (<http://www.kabarindonesia.com>).

Sejak didirikannya pada tanggal 20 Oktober 2003, HSBC Amanah Syariah telah berfokus untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, di mana nasabah akan mengetahui bahwa HSBC Amanah Syariah mampu memfasilitasi mulai *Murabahah* hingga ke transaksi sindikasi yang kompleks. Produk dan jasa perbankan Syariah terbuka bagi semua kalangan, baik Muslim maupun non-muslim ([http:// ideaonline.co.id](http://ideaonline.co.id)).

f. Bank DKI Syariah

Tahun 2002 Bank DKI mempersiapkan izin usaha Syariah, mulai dari menyiapkan sumber daya manusia, studi kelayakan, pengkajian dan workshop bank syariah, hingga membentuk Dewan Pengawas Syariah.

Hingga keluarnya surat dari Bank Indonesia mengenai ijin prinsip nomor 5/193/DPbs tanggal 11 Desember 2003 serta ijin operasional pembukaan cabang di JL Wahid Hasyim sesuai surat nomor 6/371/DPbs tanggal 8 Maret 2004, yang diresmikan pada tanggal 16 Maret 2004 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. H. Sutiyoso.

Pembukaan Bank DKI Unit Syariah merupakan konsekuensi logis dalam merespon perkembangan perbankan di tanah air. Dengan bantuan modal kerja dari Bank DKI Kantor Pusat pada saat dibentuknya unit usaha syariah sebesar Rp. 2 miliar, Bank DKI Unit Usaha Syariah bertekad untuk dapat memberikan pelayanan kepada nasabah sebaik-baiknya berdasarkan prinsip syariah, sehingga Bank DKI Syariah diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi pengguna jasa perbankan yang mayoritas beragama Islam dalam berbisnis secara syariah (Bank DKI Syariah.htm).

g. BPD Aceh Syariah

Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna Tanggal 19 Oktober 2004 Bank BPD Aceh Syariah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 Nopember 2004 (*soft opening*) sedangkan

peresmian (*grand opening*) dilakukan pada Tanggal 6 Desember 2004.

Sesuai komitmen Direksi Bank BPD Aceh, Bank BPD Aceh Syariah pasca tsunami kembali beroperasi pada Tanggal 3 Januari 2005. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi serta untuk mempertahankan keberadaannya, maka pada Tanggal 21 Februari 2005, operasional Bank BPD Aceh Syariah dipindahkan ke Jalan Mata Ie No. 17A, Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank BPD Aceh Syariah mulai beraktifitas kembali, walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota. Alhamdulillah dengan bantuan semua pihak serta semangat Sumber Daya Insaninya, penghimpunan dana masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus dipacu, sehingga sampai saat ini sudah terjalin relasi dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta di Banda Aceh dan Aceh Besar (<http://www.virtualaceh.com>).

h. BPD Riau Syariah

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dll. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank

Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah (www.bankriau.co.id).

i. BPD KalSel Syariah

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Berlandaskan pada peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional yang mengatur pemberian izin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani layanan syariah dalam produk dana (*funding*) maupun produk pinjaman (*lending*) syariah, Bank Kalsel Syariah telah mewujudkannya dengan dibukanya layanan syariah sebanyak 15 outlet pada kantor cabang konvensional (www.bankbpdkalsel.co.id).

j. BTN Syariah

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor

Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004 (www.btn.co.id).

k. BTPN Syariah

Bank BTPN membuka Cabang Unit Usaha Syariah pada hari Senin 11 Februari 2008 yang bertempat di kawasan perkantoran Cikapundung. Pembukaan Unit Usaha Syariah guna memfasilitasi kebutuhan nasabah akan keuangan yang berbasis syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang, serta beroperasi secara prinsip-prinsip syariah. Direksi Bank BTPN berupaya memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para nasabah, sehingga berdasarkan rencana bisnis bank selain di Cikapundung Bandung, cabang syariah Bank BTPN juga akan dibuka di Jakarta (www.btpn.com)

l. Bank OCBC NISP Syariah

OCBC NISP Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank OCBC NISP. OCBC NISP Syariah didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 (23 Syawal 1430 H). Dengan adanya Unit Usaha Syariah di Bank OCBC NISP akan melengkapi komitmen yang sudah ada yaitu akan terus konsisten dalam memberikan pelayanan yang

terbaik bagi para nasabah. Bank OCBC NISP Syariah meresmikan Kantor Cabang Syariah di Bank OCBC NISP Tower dan layanan syariah di 40 kantor cabang Bank OCBC NISP di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 30 Oktober 2010. Produk yang mereka sediakan adalah Tanda iB OCBC NISP Syariah, yaitu tabungan dengan prinsip syariah berdasarkan akad *wadiah* (www.ocbcnisp.com).

m. Sinarmas Syariah

Bank Sinarmas secara resmi meluncurkan layanan syariah mereka melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sinarmas pada 18 November 2009 di Jakarta setelah mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia (BI) pada 30 Oktober 2009. Di tahun 2008 total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 49,5 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 35,6 persen dibanding tahun 2007 sebesar Rp 36,5 triliun. Sementara nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) syariah rata-rata tahunannya tumbuh sebesar 33,97 persen atau di atas pertumbuhan DPK bank konvensional yang hanya mencapai 16,16 persen. Bahkan untuk pembiayaan syariah, rata-rata pertahun mampu tumbuh 37,03 persen, atau di atas pertumbuhan bank konvensional sebesar 23,80 persen. Bahkan, pada awal 2009, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 51,81 triliun, sebuah pencapaian positif di tengah imbas krisis finansial global. Padahal, pangsa pasar bank syariah di Indonesia saat ini baru sekitar 2 persen dari total industri perbankan, yang diyakini akan terus berkembang seiring

dengan dukungan yang besar baik dari BI maupun pelaku bisnis serta masyarakat (www.banksinarmas.com).

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Statistik Deskriptif Variabel secara Keseluruhan

Hasil statistik deskriptif antara variabel independen (Jumlah Pembiayaan) dan variabel dependen (Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF)) yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	43	378,45	1832,18	1193,7008	333,94499
NPF	43	36,64	87,83	58,7587	12,82247
Pembiayaan	43	843,08	1746,45	1204,3021	272,88289
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Statistik deskriptif terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan nilai minimum 378,45 juta rupiah, nilai maksimum sebesar 1832,18 juta rupiah, dengan rata-rata sebesar 1193,7008 juta rupiah. Nilai terendah dihasilkan perbankan syariah pada bulan Januari 2006, sedangkan nilai tertinggi juga dihasilkan pada bulan Juli 2010.

Statistik deskriptif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah menunjukkan nilai minimum sebesar 36,64 juta rupiah, nilai maksimum sebesar 87,83 juta rupiah, dengan rata-rata 58,7587 juta rupiah.

Nilai NPF terendah dihasilkan pada bulan Januari 2007 sedangkan nilai tertinggi dihasilkan pada bulan September 2009.

Statistik deskriptif Jumlah Pembiayaan menunjukkan nilai minimum sebesar 843,08 juta rupiah, nilai maksimum sebesar 1746,45 juta rupiah, dengan rata-rata 1204,3021 juta rupiah. Jumlah Pembiayaan terendah dihasilkan perbankan syariah pada Januari 2007 dan nilai tertinggi dihasilkan pada Juli 2010. Hal ini menunjukkan Jumlah Pembiayaan pada perbankan syariah meningkat dalam hal pengucuran dana kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga, semakin meningkat Dana Pihak Ketiga yang mampu diperoleh Bank Syariah semakin meningkat pula pengucuran dana yang dilakukan bank syariah tersebut.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun bank dari para nasabah (masyarakat). Dana pihak ketiga diukur dengan menjumlah simpanan Bank Syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito) yang berasal dari masyarakat. Data dihitung dan diukur mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Hal ini tampak pada tabel 8 yang merupakan hasil olah penelitian berdasarkan dari laporan keuangan bulanan perusahaan.

Tabel 8
Data Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
Periode Januari 2007 – Juli 2010

(juta rupiah)

No.	Bulan	2007	2008	2009	2010
1	Januari	20.514.493	27.695.656	38.195.000	53.163.000
2	Pebruari	21.054.281	28.731.084	38.651.000	53.299.000
3	Maret	21.882.933	29.552.399	38.040.000	52.811.000
4	April	22.007.608	31.063.963	39.193.000	54.043.000
5	Mei	22.570.491	31.705.310	40.288.000	55.067.000
6	Juni	22.714.256	33.048.523	42.103.000	58.079.000
7	Juli	23.231.781	32.898.049	43.004.000	60.462.000
8	Agustus	23.308.579	32.358.767	44.019.000	-
9	September	24.680.417	33.568.573	45.381.000	-
10	Oktober	25.473.335	11.731.978	46.500.000	-
11	Nopember	25.658.163	34.422.283	47.887.000	-
12	Desember	28.011.670	36.852.148	52.271.000	-
	Mean	23.425.667	30.302.394	42.961.000	55.274.857
	Min	20.514.493	11.731.978	38.040.000	52.811.000
	Max	28.011.670	36.852.148	52.271.000	60.462.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Berdasarkan tabel 8 di atas, selama periode penelitian (Januari 2006 – Juli 2010) tampak bahwa rata-rata dana pihak ketiga tahun 2007 adalah Rp 23.425.667 juta dalam tahun tersebut bulan Desember mempunyai tingkat Dana Pihak Ketiga yang tertinggi yaitu Rp 28.011.670 juta dan yang mempunyai tingkat Dana Pihak Ketiga yang paling rendah adalah pada bulan Januari yaitu Rp 20.514.493 juta. Kemudian tahun 2008 rata-rata tingkat Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi Rp 36.852.148 juta dengan tingkat Dana Pihak Ketiga tertinggi pada bulan Desember yaitu

sebesar Rp 30.302.394 dan terendah pada bulan Oktober yaitu sebesar Rp 11.731.978 juta.

Peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga semakin mengalami peningkatan pada tahun 2009 dengan rata-rata Rp 42.961.000 juta. Tingkat Dana Pihak Ketiga tertinggi pada tahun tersebut terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp 52.271.000 juta dan terendah terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar Rp 38.040.000 juta. Pada tahun 2010 rata-rata Dana Pihak Ketiga Rp 55.274.857 juta dengan nilai tertinggi pada bulan Juli yaitu Rp 60.462.000 juta dan terendah pada bulan Maret Rp 52.811.000 juta.

Statistik tersebut menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Menunjukkan pula bahwa bank syariah mampu menghimpun dana dari para nasabah (masyarakat) dan dihitung dengan menjumlah simpanan bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito) yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada periode penelitian yaitu Januari 2007 – Juli 2010 tampak pada gambar dibawah ini:



Gambar 9
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

b. Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio risiko yang biasa digunakan oleh bank untuk mengukur kinerja keuangan bank. *Non Performing Financing* diukur dengan menghitung rasio antara bagi hasil dan provisi pembiayaan dengan total pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Data tersebut dihitung dan diukur mulai dari bulan Januari 2007 sampai Juli 2010. Hal ini tampak pada tabel 9 yang merupakan hasil olah penelitian berdasarkan dari laporan keuangan bulanan bank.

Tabel 9
Data Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah
Periode Januari 2007 – Juli 2010

(juta rupiah)

No.	Bulan	2007	2008	2009	2010
1	Januari	1.045.593	1.131.915	1.676.000	2.053.000
2	Pebruari	1.132.968	1.135.717	1.789.000	2.302.000
3	Maret	1.193.858	1.236.871	2.019.000	2.275.000
4	April	1.310.774	1.361.600	2.053.000	2.309.000
5	Mei	1.352.717	1.596.161	1.942.000	2.540.000
6	Juni	1.423.361	1.441.528	1.851.000	2.170.000
7	Juli	1.557.914	1.469.117	2.204.000	2.388.000
8	Agustus	1.633.343	1.477.795	2.462.000	
9	September	1.601.686	1.553.870	2.547.000	
10	Oktober	1.628.602	1.710.708	2.492.000	
11	Nopember	1.501.323	1.913.044	2.534.000	
12	Desember	1.131.202	1.508.674	1.882.000	
	Mean	1.376.112	1.461.417	2.120.917	2.291.000
	Min	1.045.593	1.131.915	1.676.000	2.053.000
	Max	1.633.343	1.913.044	2.547.000	2.540.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Berdasarkan tabel 9 diatas tampak bahwa rata-rata pada tahun 2007 sebesar Rp 1.376.112 juta. Dalam tahun tersebut bulan agustus memiliki nilai *Non Performing Financing* tertinggi sebesar Rp 1.633.343 juta dan terendah Rp 1.045.593 pada bulan Januari. Kemudian pada tahun 2008 rata-rata sebesar Rp 1.461.417 juta. Dalam tahun tersebut bulan Nopember mempunyai nilai tertinggi yaitu Rp 1.913.044 juta dan nilai terendah pada bulan Januari sebesar Rp 1.131.915 juta.

Tahun 2009 *Non Performing Financing* perbankan syariah masih mengalami fluktuasi yang salah satunya disebabkan oleh laju inflasi dan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga dikhawatirkan akan berdampak pula pada peningkatan pembiayaan

bermasalah atau kredit macet, maka bank syariah hendaknya lebih waspada dalam mengendalikannya. Pada tahun tersebut rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) yang dimiliki perbankan syariah adalah Rp 2.120.917 juta dengan nilai tertinggi Rp 2.547.000 juta pada bulan September dan terendah pada bulan Januari sebesar Rp 1.676.000 juta. Pada periode penelitian tahun 2010 yang sementara hanya beberapa bulan masih menunjukkan angka yang cukup besar yaitu dengan rata-rata Rp 2.291.000 juta dengan nilai tertinggi Rp 2.540.000 juta pada bulan Mei dan terendah pada bulan Januari sebesar Rp 2.053.000 juta.

Pertumbuhan *Non Performing Financing* terlihat masih berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan karena pada kenyataannya peningkatan tersebut dipengaruhi pula oleh faktor bertambahnya bank konvensional yang mengembangkan usahanya dalam bentuk syariah maupun pendirian bank syariah baru. Pertumbuhan *Non Performing Financing* dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 10
Pertumbuhan *Non Performing Financing*

c. Jumlah Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan dengan kata lain penyaluran dana merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada pihak-pihak yang mengalami *defisit unit* untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana yang dilakukan bank syariah. Data dihitung dan diukur mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Hal ini tampak pada tabel 10 yang merupakan hasil olah penelitian berdasarkan dari laporan keuangan bulanan perusahaan.

Tabel 10
Data Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah
Periode Januari 2007 – Juli 2010

(juta rupiah)

No.	Bulan	2007	2008	2009	2010
1	Januari	20.218.546	27.106.630	38.201.000	47.140.000
2	Pebruari	20.462.749	27.878.279	38.843.000	48.479.000
3	Maret	20.820.064	29.629.456	39.308.000	50.206.000
4	April	21.353.493	31.021.785	39.726.000	51.651.000
5	Mei	21.920.019	32.293.151	40.715.000	53.223.000
6	Juni	22.969.103	34.099.667	42.195.000	55.801.000
7	Juli	23.687.318	35.189.987	42.828.000	57.633.000
8	Agustus	24.637.850	36.571.761	43.890.000	-
9	September	25.589.806	37.680.587	44.523.000	-
10	Oktober	26.148.752	38.097.341	45.246.000	-
11	Nopember	26.548.228	38.528.984	45.726.000	-
12	Desember	27.944.311	38.194.974	46.886.000	-
	Mean	23.525.020	33.857.717	42.340.583	52.019.000
	Min	20.218.546	27.106.630	38.201.000	47.140.000
	Max	27.944.311	38.528.984	46.886.000	57.633.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Berdasarkan tabel 10 tampak bahwa rata-rata Jumlah Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada tahun 2007 adalah

sebesar Rp 23.525.020 juta, dalam tahun tersebut bulan Desember memiliki tingkat Jumlah Pembiayaan tertinggi yaitu Rp 27.944.311 juta dan terendah pada bulan Januari yaitu Rp 20.218.546 juta. Rata-rata Jumlah Pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2008 yaitu Rp 33.857.717 juta dengan nilai tertinggi Rp 38.528.984 juta pada bulan Nopember dan terendah pada bulan Januari yaitu Rp 27.106.630 juta.

Tahun 2009 Jumlah Pembiayaan perbankan syariah menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 42.340.583 juta dengan nilai tertinggi Rp 46.886.000 juta terjadi pada bulan Desember dan nilai terendah sebesar Rp 38.201.000 juta terjadi pada bulan Januari. Tahun 2010 yang dalam penelitian ini hanya terdiri dari 7 bulan rata-rata Jumlah Pembiayaan adalah sebesar Rp 52.019.000 juta dengan nilai tertinggi bulan Juli sebesar Rp 57.633.000 juta dan terendah pada bulan Januari Rp 47.140.000 juta

Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan perbankan syariah sejak periode Januari 2007 – Juli 2010 dapat dilihat pada gambar 11. Dari gambar tersebut terlihat bahwa rata-rata Jumlah Pembiayaan perbankan syariah berfluktuatif namun cenderung terus mengalami peningkatan.



**Gambar 11
Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan**

3. Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *SPSS versi 15 for windows* dengan menguji regresi berganda yang merupakan analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan pengujian yang dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, digunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil perhitungan regresi linier berganda dan parsial dengan menggunakan *SPSS versi 15 for windows*, maka diperoleh hasil seperti tampak pada tabel 11 *coefficients* yakni sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,086	0,197		5,513	0,000
DPK	0,400	0,080	0,530	4,970	0,000
NPF	0,433	0,112	0,412	3,866	0,000
R	= 0,850	Sig F	= 0,000		
R Square	= 0,723	α	= 0,05		
F hitung	= 52,252	n	= 43		
F tabel	= 3,232				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Untuk meramalkan total Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dalam memprediksi Jumlah Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah digunakan persamaan regresi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,086 + 0,400 X_1 + 0,433 X_2 + e$$

Dimana dalam penelitian ini :

Y = Jumlah Pembiayaan

X₁ = DPK

X₂ = NPF

Persamaan garis regresi tersebut diketahui berdasarkan tabel 11 dimana koefisien variabel DPK dan NPF adalah pada besarnya nilai pada kolom *Unstandardized Coefficients* B.

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut maka:

1. Konstanta sebesar 1,086 menunjukkan jika tidak ada variabel DPK (X_1) dan NPF (X_2) atau (X_1 dan $X_2 = 0$) maka Jumlah Pembiayaan akan bernilai sebesar 1,086.

Hal tersebut dapat dijelaskan karena sumber dana utama bagi perbankan adalah besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), selain itu hanya modal sendiri dan hutang kepada pihak lain yang porsinya sangat tidak memadai untuk kegiatan penyaluran dana sehingga bank tidak memiliki penghasilan sementara terdapat biaya baik tetap maupun biaya variabel yang harus dikeluarkan bank. Pada intinya adalah bank benar-benar akan mengalami masa krisis keuangan. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermedieries*, bank berusaha menjalankan dananya sebagai amanah dari masyarakat untuk disalurkan dalam dunia usaha sebagai investasi. Berdasarkan pengamatan yang lebih mendalam nampak bahwa perbankan syariah telah berupaya menyalurkan seluruh jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya. Sehingga perbankan syariah akan kelabakan jika tidak terdapat dana pihak ketiga Rp 1,- pun ditambah dengan tidak adanya sumber lain seperti bonus dari Bank Indonesia, sehingga wajar saja jika bank mengalami krisis keuangan (dalam konteks dana yang disalurkan) sebagaimana dinyatakan dalam garis regresi di atas. Adapun nilai tersebut secara matematis dapat diterima.

2. Koefisien variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,400. Artinya apabila variabel DPK (X_1) berubah satu satuan, maka akan mengakibatkan

perubahan Jumlah Pembiayaan sebesar 0,400 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah, yaitu jika variabel DPK meningkat satu satuan, maka Jumlah Pembiayaan akan meningkat sebesar 0,400 satuan. Sebaliknya apabila variabel DPK menurun satu satuan, maka Jumlah Pembiayaan akan menurun sebesar 0,400 satuan dengan asumsi variabel NPF dianggap konstan. Nilai dan arah tersebut menunjukkan jika Dana Pihak Ketiga naik Rp 1 juta (satu juta rupiah) maka Jumlah Pembiayaan yang dikucurkan oleh Perbankan Syariah kepada masyarakat akan ikut naik sebesar Rp 400.000,- begitu pula jika DPK mengalami penurunan maka akan berpengaruh pada penurunan Jumlah Pembiayaan.

3. Kemudian untuk variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki koefisien sebesar 0,433. Artinya apabila variabel NPF (X_2) berubah satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Jumlah Pembiayaan sebesar 0,433 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah, yaitu jika variabel NPF meningkat satu satuan, maka Jumlah Pembiayaan akan meningkat sebesar 0,433 satuan. Dan sebaliknya apabila variabel NPF menurun satu satuan, maka Jumlah Pembiayaan akan menurun sebesar 0,433 satuan. Sama halnya dengan Dana Pihak Ketiga, kenaikan NPF Rp 1 juta (satu juta rupiah) akan meningkatkan Jumlah Pembiayaan sebesar Rp 433.000,-.

Besarnya kontribusi seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diterangkan dalam nilai R Square dalam tabel di atas sebesar 0,723

artinya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap Jumlah Pembiayaan sebesar 72,3% dan sisanya 27,7% merupakan faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,850 Artinya bahwa hubungan antara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 85,0%. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa antara DPK, NPF dengan Jumlah Pembiayaan sangat kuat/erat. Intepretasi koefisien korelasi ini didasarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 12
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2008)

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Linieritas

Pengujian linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Disamping itu dapat digunakan untuk mengetahui taraf signifikansi penyimpangan linieritas hubungan tersebut. Apabila penyimpangan yang ditemukan tidak signifikan maka dapat disimpulkan hubungan antara variabel respon dan prediktor linier (Maria, 2007).

Pengujian linieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *curve estimation*, jika tes bentuk kurva linier pada *curve estimation* signifikan ($p\text{-value} < \alpha$) maka dapat disimpulkan asumsi linieritas terpenuhi. Namun jika tes bentuk kurva linier tidak signifikan maka asumsi linieritas tidak terpenuhi sebab dimungkinkan adanya bentuk hubungan yang lebih cocok antara variabel terikat dan bebas atau tidak terdapat hubungan linier yang nyata antara variabel terikat dan bebas. Hasil *curve estimation* antara Jumlah Pembiayaan dan DPK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13
Hasil Uji Linieritas
Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,620	66,828	1	41	,000	1,253	,594

The independent variable is DPK.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Pada tabel diketahui bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa antara Jumlah Pembiayaan (Y) dan DPK (X_1) memiliki hubungan linieritas. Sedangkan hasil *curve estimation* antara jumlah pembiayaan dan NPF dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Hasil Uji Linieritas
Non Performing Financing dan Jumlah Pembiayaan

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,552	50,563	1	41	,000	1,696	,781

The independent variable is NPF.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Pada tabel diketahui bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa antara Jumlah Pembiayaan (Y) dan NPF (X_2) memiliki hubungan linieritas. Dengan kata lain pengujian linieritas terpenuhi.

b. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji normalitas dengan uji kolmogorov-smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai $Asymp.sig.(2-tailed) > 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. Hasil perhitungan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05224955
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		,759
Asymp. Sig. (2-tailed)		,613

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Pada tabel diketahui bahwa nilai sig.sebesar $0,613 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa residual tersebar dengan normal.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel yang tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan angka 10. Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas. Nilai multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPK	,609	1,641
	NPF	,609	1,641

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Berdasarkan Tabel , berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas :

Nilai VIF untuk DPK adalah 1,641

Nilai VIF untuk NPF adalah 1,641

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinieritas dapat terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *Cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan. Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun.

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW-Test). Hipotesis yang melandasi pengujian ini adalah :

$H_0 (r = 0)$: tidak ada autokorelasi

$H_1 (r \neq 0)$: ada korelasi

Dari tabel Durbin – Watson untuk $n = 43$ dan $k = 2$ (adalah banyaknya variabel bebas) dan $\alpha = 5\%$, diketahui nilai du sebesar 1,610 dan $4-du$ sebesar 2,390. Nilai Durbin – Watson dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,850 ^a	,723	,709	,0535399	,747

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK
b. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Pada tabel diketahui nilai Durbin – Watson sebesar 0,747 tidak terletak antara du dan $4-du$, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi tidak terpenuhi.

e. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas, atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Glejser. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis :

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Nilai signifikansi untuk heterokedastisitas menggunakan uji glejser dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,502	1,594		6,587	,000
	DPK	-5,293	,651	-1,002	-8,132	,000
	NPF	3,619	,906	,492	3,992	,000

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Berdasarkan Tabel , berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

Nilai Sig. untuk DPK adalah 0,000

Nilai Sig. untuk NPF adalah 0,000

Pada tabel diketahui bahwa nilai sig. seluruh variabel adalah $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam tidak homogen (konstan) atau dengan kata lain terdapat gejala heterokedastisitas.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dengan menggunakan *SPSS versi 15 for windows* digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi linier

berganda. Pengujian uji simultan (uji F) dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = 0$, Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a \neq 0$, Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian uji simultan (Uji F) dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi F dengan *Level of significant* (α) dengan nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis, yaitu:

- a) Jika nilai *signifikansi F* $<$ *Level of significant* (α) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b) Jika *signifikansi F* $>$ *Level of significant* (α) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pada Bab III jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hasilnya tidak signifikan. Hasil dari perhitungan *SPSS versi 15 for windows* dari tabel anova dengan signifikansi 0,05 dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,300	2	,150	52,252	,000 ^a
	Residual	,115	40	,003		
	Total	,414	42			

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

b. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai F hitung sebesar 52,252 dengan dan F tabel ($\alpha = 0,05$;df regresi = 2 ; df residual = 40) sebesar 3,232 *p-value* (0,00) lebih kecil dari *level of significant* (0,05) yang berarti bahwa menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternative (H_a). Karena F hitung > F tabel yaitu $52,252 > 3,232$ dan *p-value* < *level of significant* yaitu $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa DPK dan NPF dalam memprediksi Jumlah Pembiayaan secara bersama berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan. Dengan kata lain Jumlah Pembiayaan pada perbankan syariah dapat diprediksi secara bersama-sama dari total Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama mempengaruhi Jumlah Pembiayaan dapat diterima.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dengan menggunakan *SPSS versi 15 for windows* digunakan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Pembiayaan. Pengujian uji parsial (uji t) dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = 0$, Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a \neq 0$, Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian uji parsial (Uji t) dilakukan dengan cara membandingkan nilai antara signifikansi t dengan *Level of significant* (α) dengan nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis, yaitu:

- a) Jika nilai *signifikansi t* $<$ *Level of significant* (α) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai *signifikansi t* $>$ *Level of significant* (α) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pada Bab III dikatakan bahwa jika t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$) maka hasilnya tidak signifikan.

Berdasarkan pengujian uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) *t test* antara Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dengan Jumlah Pembiayaan (Y) menunjukkan $t_{hitung} = 4,970$ Sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; df residual = 40) sebesar 2,021. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,970 > 2,021$, maka dapat disimpulkan bahwa DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan. Hasil uji parsial yang tercantum pada tabel, diperoleh nilai signifikansi total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a), yang berarti bahwa variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen atau secara parsial variabel DPK mempunyai pengaruh dalam memprediksi Jumlah Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dimasa yang akan datang karena signifikan. Peningkatan ataupun penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya Jumlah Pembiayaan yang akan dikucurkan oleh Perbankan Syariah terlihat dari hubungan yang positif atau searah.
- 2) *t test* antara *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) dengan Jumlah Pembiayaan (Y) menunjukkan $t_{hitung} = 3,866$. Sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; df residual = 40) adalah sebesar 2,021. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,866 > 2,021$, sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan. Hasil uji parsial yang tercantum pada tabel, diperoleh nilai signifikansi total *Non Performing Financing* (NPF) sebesar $0,00 < 0,05$, maka H_0

ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a), yang berarti bahwa berarti bahwa variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen atau secara parsial variabel NPF mempunyai pengaruh dalam memprediksi Jumlah Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dimasa yang akan datang karena signifikan. Peningkatan ataupun penurunan *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya Jumlah Pembiayaan yang akan dikucurkan oleh Perbankan Syariah terlihat dari hubungan yang positif atau searah.

Pengujian uji t tersebut menyatakan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial mempengaruhi Jumlah Pembiayaan dapat diterima.

c. Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel X dan Y. Secara verbal, R^2 atau *R Square* berguna untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase jumlah variasi dan variabel terikat (sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat). Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diperoleh koefisien determinasi R^2 atau *R Square* sebesar 0,723 atau 72,3% yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dan *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Pembiayaan (Y) adalah sangat kuat.

Tabel 20
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model		Coefficients		
		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	DPK	,787	,618	,413
	NPF	,743	,522	,322

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Selain dicari nilai R^2 seperti di atas, perlu juga diketahui koefisien determinasi parsialnya untuk mengetahui sumbangan masing-masing variabel independen terhadap variabel terikatnya. Dengan mengkuadratkan koefisien korelasi parsial maka koefisien korelasi parsial total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) dapat diketahui. Berdasarkan perhitungan diperoleh r^2 untuk total dana pihak ketiga sebesar 38,19% dan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 27,25%, hal tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan pengkuadratan koefisien parsial sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 21
Hasil Uji Parsial

Variabel	Partial (r)	r^2
DPK	0,618	0,3819
NPF	0,522	0,2725

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini layak dipakai. Hal tersebut dikarenakan sebagian

besar variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model.

D. Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji analisis regresi linear berganda, di mana nilai koefisien dari semua variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) masing-masing bernilai positif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut ini dijelaskan masing – masing pengaruh variabel bebas yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan sebagai variabel terikat baik secara parsial maupun simultan (bersama-sama).

1. Pengaruh DPK dan NPF secara simultan terhadap Jumlah Pembiayaan

Perumusan masalah yang pertama salah satunya menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah Pembiayaan. Dalam penelitian ini variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan variabel bebas yang berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan sebagai variabel terikat. Kedua variabel bebas tersebut

mempunyai kontribusi terhadap Jumlah Pembiayaan sebesar 0,723 yang berarti bahwa variasi Jumlah Pembiayaan dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 72,3%, sedangkan sisanya sebesar 27,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel DPK dan NPF terhadap Jumlah Pembiayaan dapat ditunjukkan dengan melihat hasil uji F yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $(52,252 > 3,232)$. Dari hasil uji F tersebut maka terbukti bahwa hipotesis pertama yang mengungkapkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari DPK dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan dapat diterima.

Kenaikan dan penurunan total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) akan memberikan informasi bagi manajemen bank untuk mengambil keputusan keuangan yang berkaitan dengan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab manajemen bank baik dalam hal pendanaan, investasi maupun manajemen aktivitya. Manajer keuangan harus bisa mengkombinasikan antara pendanaan pada sisi pasiva, dengan investasi yang dijalankan dan manajemen aktiva yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang berkaitan dengan semua entitas bisnis (*stakeholder*) baik itu pemegang saham maupun nasabah.

Pengaruh secara bersama-sama total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan pada perbankan syariah harus dikelola dengan baik oleh bank. Pengelolaan

variabel tersebut tidak hanya dikonsentrasikan pada salah satu variabel independen saja akan tetapi pengelolaan yang seimbang diantara variabel independennya. Pengelolaan pada total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah dimaksudkan agar penyaluran dana yang diberikan perbankan syariah memberikan kontribusi yang positif. Kontribusi yang positif tersebut antara lain meningkatnya bagi hasil yang diterima baik bank maupun nasabah yang dilakukan dengan meningkatkan DPK maupun pembiayaan yang bermasalah (NPF), meningkatnya dividen bagi pemegang saham, bantuan modal yang diberikan bank kepada pihak yang minus dana akan sangat membantunya dan lain-lain.

Bagi hasil dapat meningkat dengan meningkatkan DPK. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan hasil penelitian bahwa setiap variabel tersebut meningkat, penyaluran dana yang dilakukan bank tersebut juga meningkat. Penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana merupakan kegiatan bank yang menghasilkan pendapatan yang paling banyak. Dana yang disalurkan tersebut akan berusaha dikelola nasabah dengan baik. Pengelolaan dana yang baik oleh nasabah akan menguntungkan bank dalam bentuk bagi hasil.

Bagi hasil merupakan pendapatan bagi bank, jadi apabila bank melakukan penyaluran dana yang besar maka pendapatan yang diterima bank akan menjadi besar pula. Penurunan pembiayaan bermasalah juga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank. Dana yang telah

disalurkan kepada masyarakat akan menghasilkan pendapatan yang tinggi apabila pembiayaan bermasalah dikurangi. Dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar akan merugikan bank apabila nasabah macet dalam hal pembayaran pokok dan bagi hasilnya. Pendapatan yang besar akan diperoleh bank apabila dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar dan tidak mengalami masalah atau tidak terjadi *Non Performing Financing* (NPF).

2. Pengaruh DPK dan NPF secara parsial terhadap Jumlah Pembiayaan

Pengaruh variabel bebas secara parsial dengan menggunakan uji t, dapat dilihat penjelasannya untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

a. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda didapat variabel DPK memiliki koefisien regresi yang menunjukkan nilai sebesar 0,400. Nilai tersebut berarti bahwa variabel bebas DPK memiliki pengaruh positif atau searah terhadap Jumlah Pembiayaan yaitu apabila DPK mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka Jumlah Pembiayaan akan meningkat sebesar 0,400 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan. Ketika DPK meningkat Rp 1 maka Jumlah Pembiayaan akan meningkat pula Rp 400.000,- hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menanamkan dananya pada bank syariah semakin besar pula dana yang dikucurkan kembali untuk masyarakat. Dari uji t didapat hasil bahwa variabel bebas DPK

berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,970 > 2,232$) dan tingkat signifikansi yang kurang dari derajat kepercayaan yang dipakai yaitu sebesar 5% ($0,000 < 0,05$).

Hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa DPK merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan atau dengan kata lain DPK merupakan faktor yang dapat menaikkan Jumlah Pembiayaan secara nyata. Pengaruh positif yang terjadi sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin besar nilai DPK suatu bank maka semakin besar pula dana yang disalurkan untuk pembiayaan yang menunjukkan bahwa semakin meningkat Dana Pihak Ketiga secara signifikan akan meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat, begitu sebaliknya semakin menurun Dana Pihak Ketiga akan menurunkan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Megaputra (2008) yaitu DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan. Dana Pihak Ketiga bagi Perbankan Syariah berperan penting dalam pengambilan keputusan penyaluran dana. Adapun Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank syariah yaitu giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Dana-dana dari pihak ketiga tersebut harus dimaksimalkan karena absolut berkontribusi terhadap kegiatan utama bank yaitu penyaluran dana kepada masyarakat.

Mengingat akan pentingnya peran dana pihak ketiga bagi perbankan syariah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya yaitu dengan memasifkan strategi pemasaran yang tepat dengan memperhatikan aspek bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi yang disediakan bank, aspek keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan kepada nasabah, aspek daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu nasabah dan memberikan pelayanan dengan tanggap, aspek jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan, dan aspek empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para nasabah. Dengan strategi tersebut diharapkan akan dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Bank akan menikmati keuntungan yang lebih besar sedangkan masyarakat dimudahkan dengan dana yang disalurkan kepadanya.

b. Variabel *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda didapat variabel NPF memiliki koefisien regresi yang menunjukkan nilai sebesar 0,433. Nilai tersebut berarti bahwa variabel bebas NPF memiliki pengaruh yang positif atau searah terhadap Jumlah Pembiayaan, yaitu apabila NPF mengalami peningkatan satu satuan maka Jumlah Pembiayaan akan

mengalami peningkatan sebesar 0,433 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan. Ketika NPF meningkat Rp 1 maka Jumlah Pembiayaan akan meningkat pula Rp 433.000,-. Dari uji t didapat hasil bahwa variabel bebas NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,866 > 2,232$) dan tingkat signifikansi yang kurang dari derajat kepercayaan yang dipakai yaitu sebesar 5 % ($0,00 < 0,05$).

Pengaruh NPF yang signifikan dan positif ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Megaputra (2008) yang menyatakan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan. Pengaruh positif NPF dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Non Performing Financing* (NPF) menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu bank syariah. Ajaran islam mengajarkan tolong-menolong antar manusia oleh karena itu bila terdapat pembiayaan yang macet dikarenakan pengusaha mengalami kebangkrutan, maka pihak bank syariah dapat membebaskan pengusaha tersebut dari kewajiban mengembalikan dana yang berasal dari pembiayaan.

Peningkatan NPF berarti pula peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Jika hal ini terus menerus terjadi maka jumlah dana yang dimiliki oleh bank akan berkurang karena digunakan untuk memenuhi kewajiban membayar PPAP (Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif/Cadangan Kerugian Piutang) atas pembiayaan

bermasalah. Untuk menutupi kewajiban atas PPAP yang terbentuk maka pihak bank akan melakukan berbagai cara termasuk menambah jumlah pembiayaan yang memberikan untung yang cukup besar dan waktu yang tidak terlalu panjang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian pada saat penyaluran dana untuk pembiayaan tersebut.

Terjadinya peningkatan Jumlah Pembiayaan pada saat kenaikan *Non Performing Financing* akan berdampak pada kerugian pada bank tersebut, namun pada kenyataannya hal itu terjadi dan tidak diikuti oleh hal yang serupa. Artinya sekalipun Jumlah Pembiayaan meningkat seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF), perbankan syariah tidak menunjukkan keterpurukan dengan semakin banyaknya bank-bank syariah yang semakin berkembang serta meningkatnya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank syariah untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Padahal *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko yang harus ditanggung bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu dimana rata-rata besarnya pembiayaan yang bermasalah atau persentase *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah tergolong kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu masih berkisar di bawah standar BIS (Bank Indonesia Syariah sebesar 5%) yang mana bank konvensional lebih sensitif dengan instrumen derivatif sedangkan bank syariah akan lebih sensitif apabila sektor riil mengalami guncangan. Hal tersebut

disebabkan karena perbankan syariah lebih aktif dan cenderung untuk membiayai dunia usaha dalam sektor riil dalam kegiatan penyaluran dananya, dan hingga saat ini sektor riil di Indonesia masih dalam batas yang dapat dikatakan aman dari berbagai guncangan perekonomian.

3. Variabel Bebas yang Berpengaruh Dominan Terhadap Jumlah Pembiayaan

Dari hasil analisis regresi diatas apabila dilihat pada *Unstandardized coefficients*, diketahui bahwa NPF merupakan variabel bebas yang berpengaruh paling dominan terhadap Jumlah Pembiayaan. Nilai yang dimiliki paling besar diantara variabel bebas lain yaitu 0,433 dengan arah positif yang berarti semakin tinggi rasio ini semakin meningkatkan penyaluran dana yang berarti bank syariah masih bisa mengatasi adanya pembiayaan bermasalah tersebut baik dengan meningkatkan dana pihak ketiga maupun memperkecil jumlah penyaluran dana untuk pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan pada Perbankan syariah di Indonesia tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1), *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap Jumlah Pembiayaan (Y) secara simultan terbukti atau dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan nilai signifikansi F yaitu $0,000 < 0,05$ (alpha) dan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,723. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 72,3% dan sisanya 27,7% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,850 yang berarti ada hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dan *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap variabel terikat Jumlah Pembiayaan (Y).
2. Hasil regresi secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) didapatkan nilai probabilitas (sig-t) dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.

Nilai signifikansi (X_1) yaitu sebesar ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan (Y). Dengan signifikansi hasil penelitian ini maka penerapan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) pada Perbankan syariah menjadi salah satu yang menentukan tinggi atau rendahnya penyaluran atau jumlah pembiayaan yang dikucurkan.

3. Hasil regresi secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) didapatkan nilai probabilitas (sig-t) dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Nilai signifikansi (X_2) yaitu sebesar ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan (Y). *Non Performing Financing* (NPF) memiliki tingkat signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel bebas lainnya yang dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan signifikansi hasil penelitian ini maka penerapan variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan syariah menjadi salah satu yang menentukan tinggi atau rendahnya penyaluran atau jumlah pembiayaan yang dikucurkan.

4. Kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa diantara variabel bebas, variabel *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) adalah yang paling dominan atau yang paling berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan (Y). Pengaruh yang diberikan adalah searah dengan Jumlah Pembiayaan (Y). Adanya peningkatan *Non Performing Financing* akan berdampak serius terhadap kinerja bank. Apabila saat kenaikan *Non Performing Financing*

terjadi peningkatan juga pada penyaluran dana akan berdampak pada kerugian pada bank tersebut.

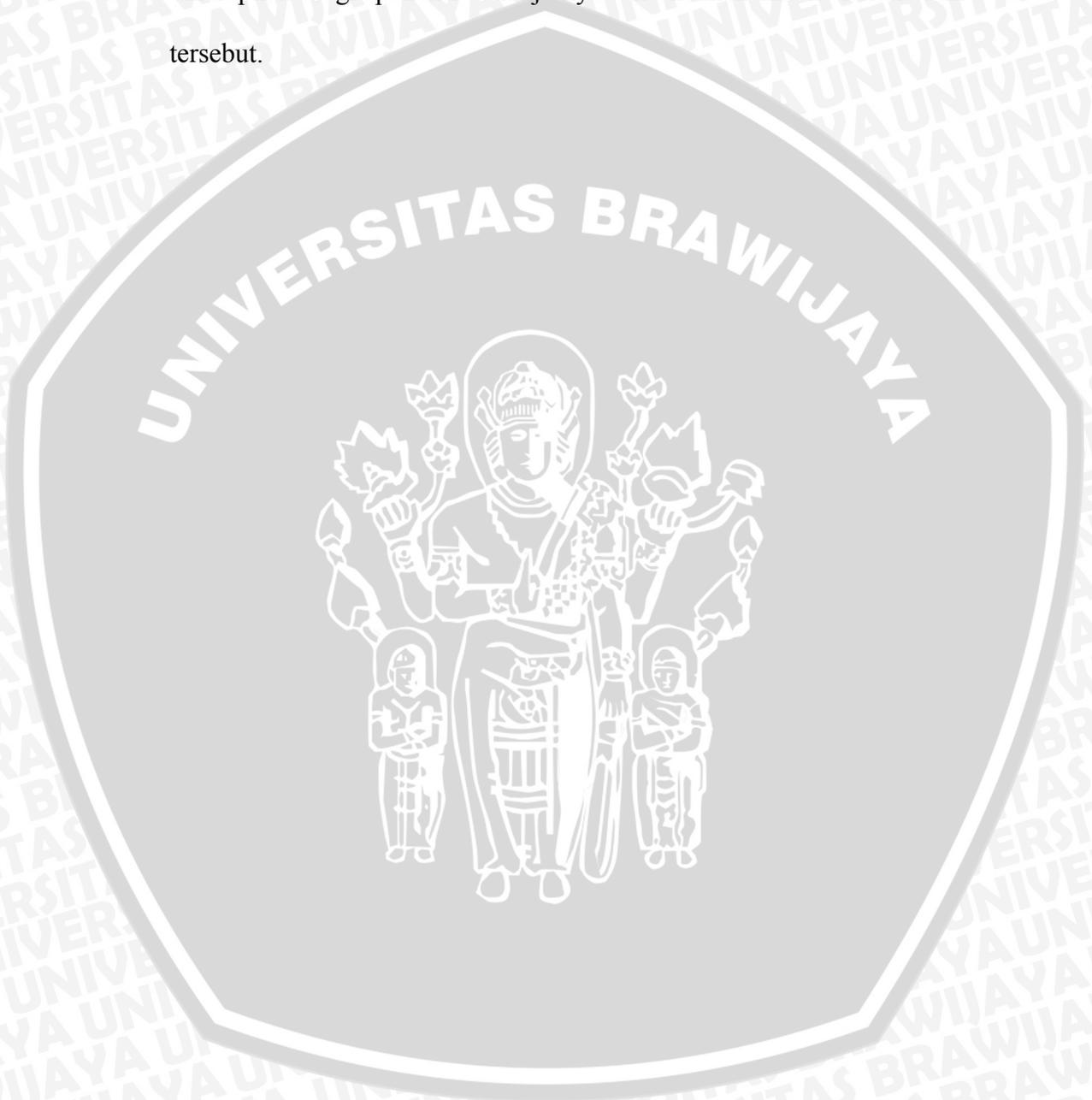
B. Saran

1. *Non Performing Financing* (NPF), merupakan salah satu alat penilaian kesehatan Bank Syariah, oleh karena itu harus dikelola sedemikian rupa agar tidak melampaui batas maksimal ketentuan Bank Indonesia yakni 5%. NPF dalam perbankan syariah juga merupakan refleksi dari bagi hasil yang akan diberikan bank syariah. Dalam masa pertumbuhan bank syariah yang masih baru dengan karakteristik produk dan pola FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dalam memaksimalkan bagi hasil, serta keberadaan *dual banking system* dan *dual monetary system* di Indonesia, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi NPF diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada perbankan syariah terjadi fluktuasi (naik-turun) NPF, sementara DPK meningkat. Peningkatan DPK dapat pula berpengaruh terhadap penurunan NPF.
2. Untuk menanggulangi terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah, perbankan syariah hendaknya lebih waspada dalam menyikapinya dengan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi pada kegiatan pembiayaan dengan lebih selektif terhadap para calon nasabah. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan pedoman untuk mengurangi pembiayaan yang bermasalah. Kehati-hatian dalam penyaluran dana ini dilakukan agar dana yang disalurkan bisa

digunakan sebagaimana mestinya dan bisa menghasilkan keuntungan bagi bank. Selain itu dilihat dari sudut pandang nasabah, yang memilih untuk menggunakan lembaga syariah tentunya mereka telah memahami prinsip-prinsip syariah itu sendiri, sehingga akan cenderung menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dimana terdapat prinsip kepercayaan, kredibilitas, amanah, dan ketaatan. Oleh karenanya nasabah akan berupaya semaksimal mungkin merealisasikan sesuai apa yang menjadi tanggung jawabnya (dari perspektif ini dapat pula mengurangi adanya kemungkinan pembiayaan bermasalah).

3. Perbankan syariah harus lebih cerdas mencari sumber dana pendukung dalam kegiatan penyaluran dana, karena yang terjadi sampai detik ini kegiatan penyaluran dana sangat tergantung dari besarnya jumlah dana pihak ketiga (DPK). Namun demikian penghimpunan DPK harus tetap dimaksimalkan dengan melengkapi jenis pembiayaan yang belum dimiliki di setiap cabangnya.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan pertimbangan variabel-variabel lainnya. Mengingat semua variabel bebas yang diteliti merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Jumlah Pembiayaan pada Perbankan Syariah, namun hanya dua variabel yang memberikan pengaruh secara signifikan, untuk itu Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah faktor lain diluar penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai R Square

sebesar 0,723 atau 72,3% hal ini berarti bahwa sebesar 27,7% Jumlah Pembiayaan dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah faktor lain tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad Amin. 2001. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Bank Indonesia. 2004. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*. Jakarta.
- Business Finance Dictionary*. 2010.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit – UNDIP.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2003. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia.
- _____. 2001. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Muamalat Institute
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media

Laksmiana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Lewis, Melvin K. dan Latifa M. Algaoud. 2001. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Strategi Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andy Offset.

Octaviana, Citra. 2007. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam. Edisi: IV/VII, 10 Rajab 1428 H / 25 Juli 2007.

Perwataatmadja, Karnaen and Antonio, Muhammad Syafi'i. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Pikir, Toto Warsoko. 2004. *Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang*. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.

Putong, Huzafah Iskandar. 2003. *Riba Menurut Al-qur'an, Taurat dan Injil*, Jakarta: Grhadika Press.

Sasmitasiwi, Banoon dan Malik Cahyadin. 2007. *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*. Simposium Riset Ekonomi III ISEI Cabang Surabaya. Tanggal 24 November 2007. Universitas Petra Surabaya.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Simorangkir. 2000. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed. 2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.

Suhardjono, Prayogo dan Tri Budi. 2007. *Metode Penelitian di Bidang Teknik Pengairan*. Universitas Brawijaya Malang.

Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI& Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Salemba Empat.

Wibowo, Muhammad Ghafur. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press.

Skripsi

Agustina, Merry. 2009. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Efisiensi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Tabungan dan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2004-2008)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

Anggraini, Desti. 2005. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri)*. Thesis. PSTUI

Megaputra, Anggoro Yosi. 2008. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

Surya, Muhammad. 2009. Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dalam www.WordPress.com diakses tanggal 14 Desember 2009.

www.bi.go.id

www.datacon.co.id

www.muamalatbank.com

www.syariahmandiri.co.id

www.bsmi.co.id

<http://www.linkedin.com>

<http://www.syariahbukopin.co.id>

<http://www.kabarbisnis.com>

<http://www.bankvictoriasyariah.co.id>

<http://rizki.situsmesin.com>

www.mediaindonesia.com

www.bnisyariah.tripod.com

www.datacon.co.id

danamon.php.htm

www.permata.html

www.bankbii.com

Cimbinfo-7-188.html

<http://www.kabarindonesia.com>

<http://ideaonline.co.id>

Bank DKI Syariah.htm

<http://www.virtualaceh.com>

www.bankriau.co.id

www.bankbpdkalsel.co.id

www.btn.co.id

www.btpn.com

www.ocbenisp.com

www.banksinarmas.com



CURRICULUM VITAE

Nama : Fenti Rahmawati Ningtyas
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 23 April 1988
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : cy_pingping@yahoo.com
Alamat : Jl. Sastrodikoro Perak I/114, Lumajang

Pendidikan Formal:

1. SD Muhammadiyah 3 Pontianak **Tamat Tahun** 1999.
2. SMP Negeri 2 Lumajang **Tamat Tahun** 2002.
3. SMK Negeri 2 Lumajang **Tamat Tahun** 2005.
4. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis **Tamat Tahun** 2011.

Pengalaman Organisasi :

1. Staff Bidang Pelatihan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Staff Bidang Penelitian *Research Study Club* (RSC) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya periode 2007-2008.
3. Kepala Bidang Inventaris dan Komputer (Invkomp) *Research Study Club* (RSC) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya periode 2008-2009.

Pengalaman Kerja :

1. On Air di RCB (Radio Cakra Bhuna) program SINGKAT (Sahabat Informasi Memikat), Mei-Juni 2008, Oktober 2008.

2. Surveyor Lembaga Survey Jaringan Isu Publik (JIP) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ponorogo Tahun 2010.
3. Sukarelawan *Quickcount* Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Surabaya.
4. Surveyor Kompetisi LA StreetBall Malang Tahun 2010.
5. Enumerator Penelitian Dosen Fakultas Ilmu Administrasi bidang UKM.

Pengalaman Kepanitiaan :

1. Bendahara Pelaksana Kuliah Tamu Himpunan Mahasiswa Bisnis (Himabis) Tahun 2006.
2. Koordinator Acara Musyawarah Besar (Mubes) *Research Study Club* (RSC) Tahun 2007.
3. Sie Acara Diklat Metodologi Penelitian *Sosial Research Study Club* (RSC) Tahun 2007.
4. Sie Konsumsi pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Pelajar (LKTIP) SMA/ Sederajat Tingkat Provinsi Jawa Timur 2008.
5. Sie Acara Business Carnival Himpunan Mahasiswa Bisnis (Himabis) FIA UB Tahun 2008.
6. Sie Acara Pendidikan dan Pelatihan *Research Study Club* (Diklat RSC) Tahun 2008.
7. Panitia Pelaksana Beswan Bakti Masyarakat (BBM) Djarum Bakti Pendidikan di Dampit Tahun 2009.
8. Panitia Pelaksana dalam Kegiatan Seminar Entrepreneurship Djarum Road to Campus Tahun 2009.
9. Panitia Pelaksana Open Recruitment Penerima Beasiswa (Beswan) Djarum Bakti Pendidikan Tahun 2009.
10. Panitia Pelaksana Dare To Be A Leader Beswan Djarum Bakti Pendidikan Tahun 2010.
11. Sie Acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2 Maba) FIA Tahun 2007 dan 2008.

12. Sie Acara Reuni antar Generasi Research Study Club (Regresi RSC) Tahun 2011.

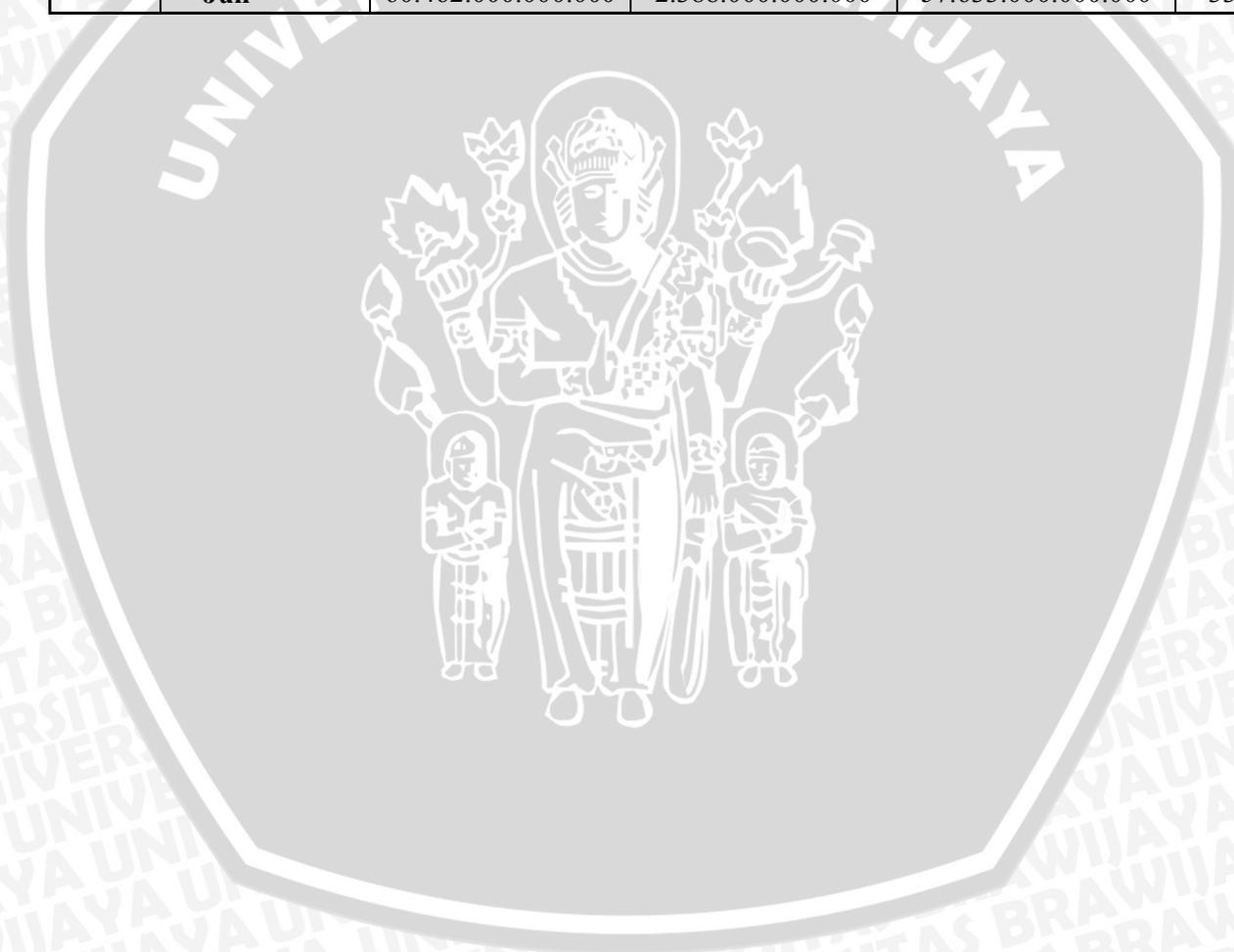
Karya Tulis:

1. Seni Barongsay Sebagai Media Komunikasi Budaya Dalam Mendukung Integrasi Bangsa, Diajukan dalam Rangka Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Baru Bidang Seni, Tingkat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Kentang Gulung Tika sebagai Penganekaragaman Wisata Kuliner, Diajukan dalam Rangka Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dikti, Tingkat Nasional.
3. *Good Environmental Governance* (GEG): Visi Politik Pembangunan Berwawasan Ekologi, Diajukan dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa Bidang Polhukam, Tingkat Nasional.
4. Penerapan *Blue Ocean Strategy* dalam Menciptakan Ruang Persaingan Baru, Diajukan dalam Rangka Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Lama Bidang Sosial, Tingkat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Cantik Indonesia dalam Balutan Kebaya Kontemporer, Diajukan dalam Rangka Mengikuti Lomba Karya Tulis Seni, Tingkat Nasional.
6. Brokoli Hura-hura sebagai Penganekaragaman Kudapan Berbahan Sayuran, PKM DIKTI bidang kewirausahaan, Diajukan dalam Rangka Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti, Tingkat Nasional.
7. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan (Studi pada Perbankan Syariah Indonesia).

Data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Jumlah Pembiayaan dan Jumlah Bank Syariah Indonesia

Tahun	Bulan	X		Y	Jml Bank
		Dana Pihak Ketiga (DPK)	Non Performing Financing (NPF)	Jumlah Pembiayaan	
2007	Januari	20.514.493.000.000	1.045.593.000.000	20.218.546.000.000	23
	Pebruari	21.054.281.000.000	1.132.968.000.000	20.462.749.000.000	24
	Maret	21.882.933.000.000	1.193.858.000.000	20.820.064.000.000	24
	April	22.007.608.000.000	1.310.774.000.000	21.353.493.000.000	25
	Mei	22.570.491.000.000	1.352.717.000.000	21.920.019.000.000	26
	Juni	22.714.256.000.000	1.423.361.000.000	22.969.103.000.000	26
	Juli	23.231.781.000.000	1.557.914.000.000	23.687.318.000.000	27
	Agustus	23.308.579.000.000	1.633.343.000.000	24.637.850.000.000	27
	September	24.680.417.000.000	1.601.686.000.000	25.589.806.000.000	28
	Oktober	25.473.335.000.000	1.628.602.000.000	26.148.752.000.000	28
	Nopember	25.658.163.000.000	1.501.323.000.000	26.548.228.000.000	29
	Desember	28.011.670.000.000	1.131.202.000.000	27.944.311.000.000	28
2008	Januari	27.695.656.000.000	1.131.915.000.000	27.106.630.000.000	28
	Pebruari	28.731.084.000.000	1.135.717.000.000	27.878.279.000.000	31
	Maret	29.552.399.000.000	1.236.871.000.000	29.629.456.000.000	31
	April	31.063.963.000.000	1.361.600.000.000	31.021.785.000.000	31
	Mei	31.705.310.000.000	1.596.161.000.000	32.293.151.000.000	31
	Juni	33.048.523.000.000	1.441.528.000.000	34.099.667.000.000	31
	Juli	32.898.049.000.000	1.469.117.000.000	35.189.987.000.000	31
	Agustus	32.358.767.000.000	1.477.795.000.000	36.571.761.000.000	31
	September	33.568.573.000.000	1.553.870.000.000	37.680.587.000.000	31
	Oktober	11.731.978.000.000	1.710.708.000.000	38.097.341.000.000	31
	Nopember	34.422.283.000.000	1.913.044.000.000	38.528.984.000.000	31
	Desember	36.852.148.000.000	1.508.674.000.000	38.194.974.000.000	32
2009	Januari	38.195.000.000.000	1.676.000.000.000	38.201.000.000.000	31
	Pebruari	38.651.000.000.000	1.789.000.000.000	38.843.000.000.000	31
	Maret	38.040.000.000.000	2.019.000.000.000	39.308.000.000.000	31
	April	39.193.000.000.000	2.053.000.000.000	39.726.000.000.000	30
	Mei	40.288.000.000.000	1.942.000.000.000	40.715.000.000.000	30
	Juni	42.103.000.000.000	1.851.000.000.000	42.195.000.000.000	30
	Juli	43.004.000.000.000	2.204.000.000.000	42.828.000.000.000	29
	Agustus	44.019.000.000.000	2.462.000.000.000	43.890.000.000.000	29
	September	45.381.000.000.000	2.547.000.000.000	44.523.000.000.000	29
	Oktober	46.500.000.000.000	2.492.000.000.000	45.246.000.000.000	31
	Nopember	47.887.000.000.000	2.534.000.000.000	45.726.000.000.000	31
	Desember	52.271.000.000.000	1.882.000.000.000	46.886.000.000.000	31

Tahun	Bulan	X		Y	Jml Bank
		Dana Pihak Ketiga (DPK)	Non Performing Financing (NPF)	Jumlah Pembiayaan	
2010	Januari	53.163.000.000.000	2.053.000.000.000	47.140.000.000.000	31
	Pebruari	53.299.000.000.000	2.302.000.000.000	48.479.000.000.000	32
	Maret	52.811.000.000.000	2.275.000.000.000	50.206.000.000.000	33
	April	54.043.000.000.000	2.309.000.000.000	51.651.000.000.000	34
	Mei	55.067.000.000.000	2.540.000.000.000	53.223.000.000.000	34
	Juni	58.079.000.000.000	2.170.000.000.000	55.801.000.000.000	33
	Juli	60.462.000.000.000	2.388.000.000.000	57.633.000.000.000	33



Analisis Statistik

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	43	378,45	1832,18	1193,7008	333,94499
NPF	43	36,64	87,83	58,7587	12,82247
Pembiayaan	43	843,08	1746,45	1204,3021	272,88289
Valid N (listwise)	43				

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPF, DPK ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,850 ^a	,723	,709	,0535399

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,300	2	,150	52,252	,000 ^a
	Residual	,115	40	,003		
	Total	,414	42			

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

b. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,086	,197		5,513	,000
DPK	,400	,080	,530	4,970	,000
NPF	,433	,112	,412	3,866	,000

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Coefficients^a

Model	Correlations		
	Zero-order	Partial	Part
1 DPK	,787	,618	,413
NPF	,743	,522	,322

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan



Uji Asumsi Klasik

1. Asumsi Linieritas Curve Fit (Y vs X1)

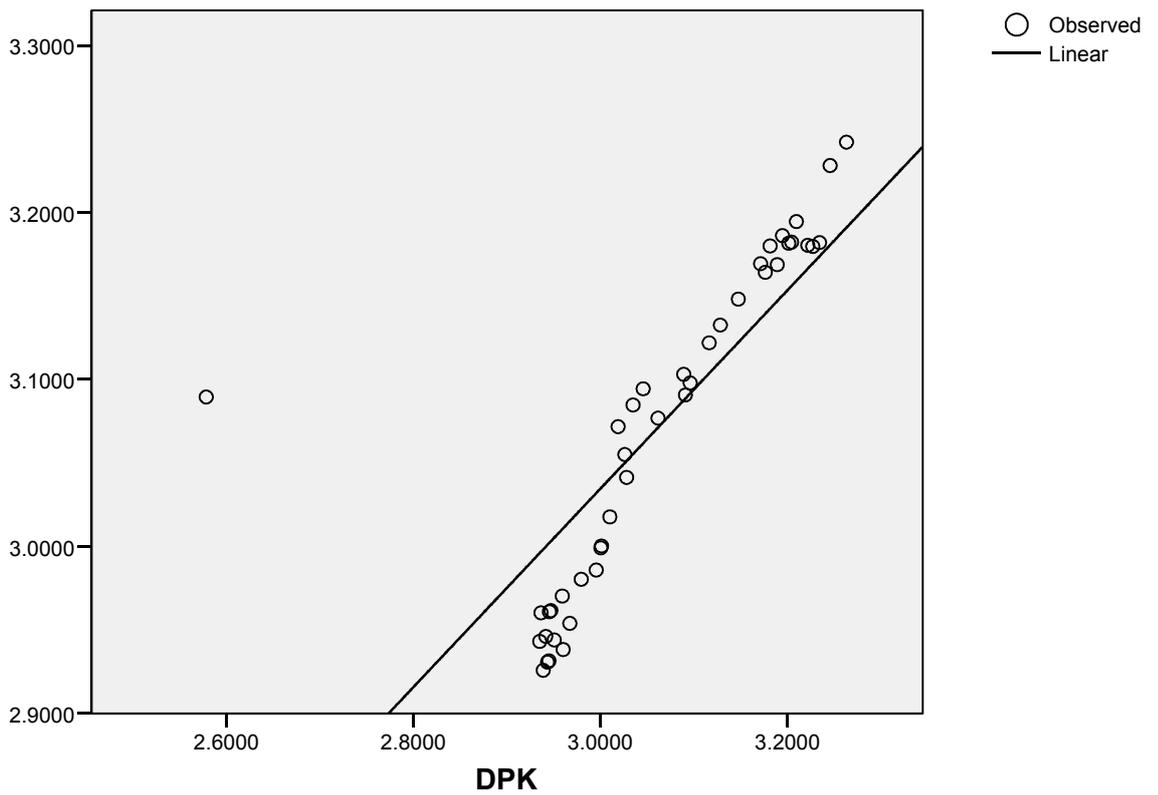
Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Equation	Model Summary				Parameter Estimates		
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,620	66,828	1	41	,000	1,253	,594

The independent variable is DPK.

Jumlah Pembiayaan



Curve Fit (Y vs X2)

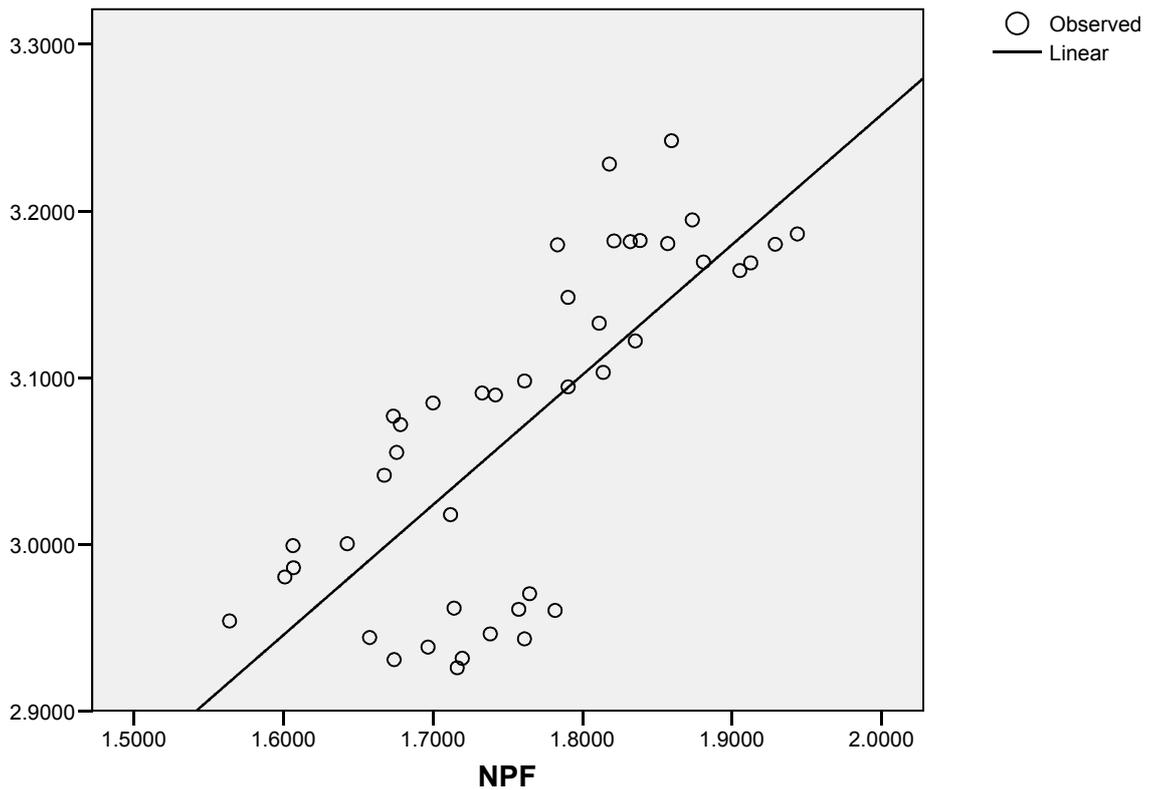
Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,552	50,563	1	41	,000	1,696	,781

The independent variable is NPF.

Jumlah Pembiayaan

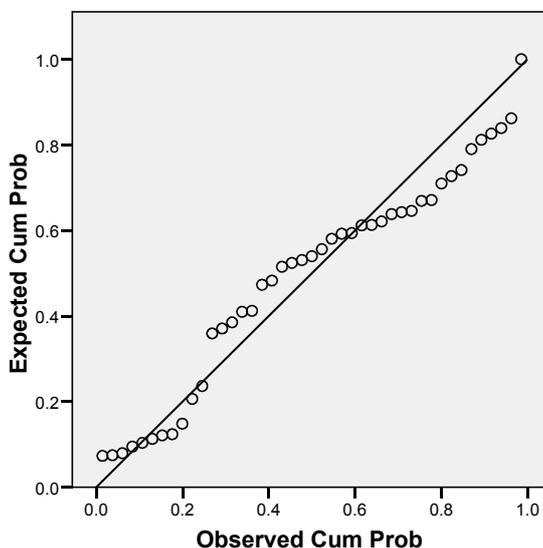


2. Asumsi Normalitas

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05224955
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		,759
Asymp. Sig. (2-tailed)		,613

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Asumsi Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,850 ^a	,723	,709	,0535399	,747

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

b. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

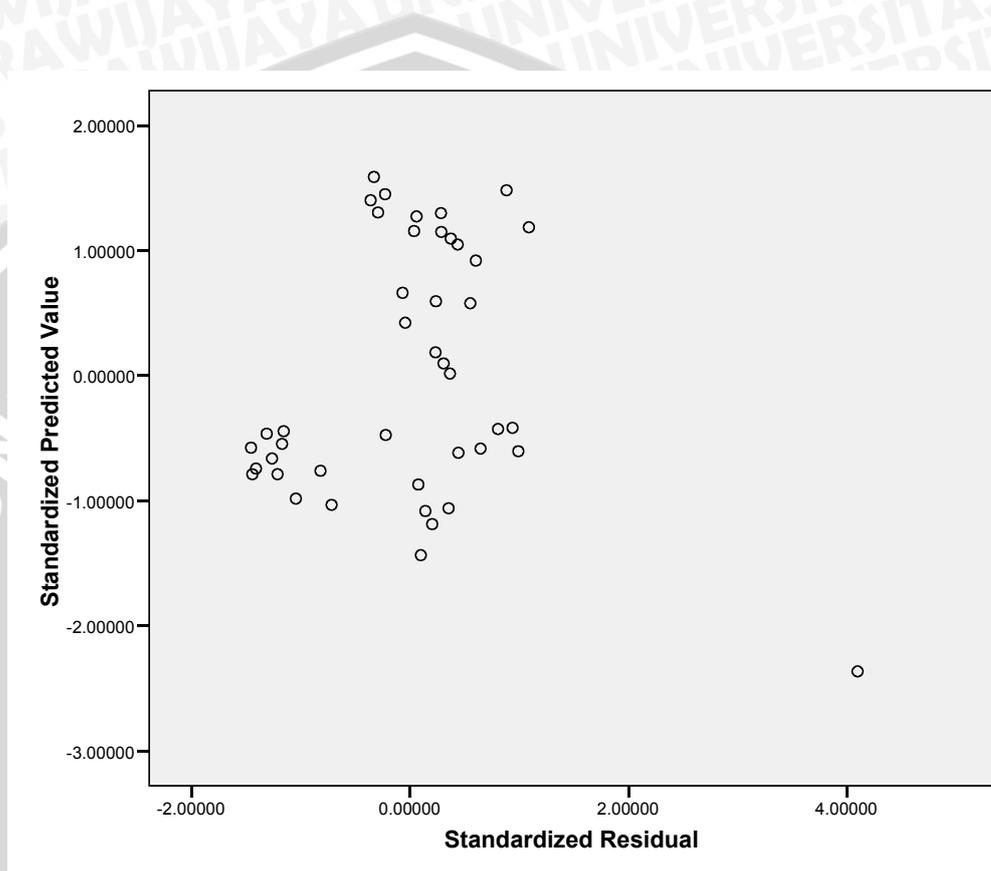
4. Asumsi Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPK	,609	1,641
	NPF	,609	1,641

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

5. Asumsi Heterokedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,502	1,594		6,587	,000
	DPK	-5,293	,651	-1,002	-8,132	,000
	NPF	3,619	,906	,492	3,992	,000

a. Dependent Variable: AbsRes

